

**EFEKTIVITAS PENERBITAN SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN
INDUSTRI RUMAH TANGGA (SPP-IRT) SECARA DIGITAL ONLINE
SINGLE SUBMISSION (OSS) PADA USAHA MIKRO KECIL
MENENGAH (UMKM) DI KABUPATEN BANYUMAS**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

Oleh:
HABIB RISNANTO
NIM 1717201191

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Habib Risnanto
NIM : 1717201191
Jenjang : S.1
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Efektivitas Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) Secara Digital *Online Single Submission* (OSS) Terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kabupaten Banyumas

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri pada bagian-bagian yang dirujuk sebelumnya.

Purwokerto, 26 Mei 2024

Saya yang menyatakan,



Habib Risnanto

NIM. 1717201191



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**EFEKTIVITAS PENERBITAN SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN
INDUSTRI RUMAH TANGGA (SPP-IRT) SECARA DIGITAL ONLINE
SINGLE SUBMISSION (OSS) PADA USAHA MIKRO KECIL MENENGAH
(UMKM) DI KAB.BANYUMAS**

Yang disusun oleh Saudara **Habib Risnanto NIM 1717201191** Program Studi **S-1 Ekonomi Syariah** Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Rabu, 29 Mei 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji

Dr. Rina Heriyanti, S.S., M.Hum.
NIP. 19720828 199903 2 004

Sekretaris Sidang/Penguji

Safrina Muanyich, S.E., M.Si.
NIP. 19921230 201903 2 026

Pembimbing/Penguji

Miftaaklul Amri, S.Sy., M.H.
NIP. 19920912 202012 1 012

Purwokerto, 30 Mei 2024

Mengesahkan



Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 19750921 200212 1 004

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth: Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI

di-

Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudara Habib Risnanto NIM. 1717201191 yang berjudul:

**EFEKTIVITAS PENERBITAN SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN
INDUSTRI RUMAH TANGGA (SPP-IRT) SECARA DIGITAL *ONLINE*
SINGLE SUBMISSION (OSS) TERHADAP USAHA MIKRO KECIL
MENENGAH (UMKM) di Kabupaten Banyumas**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Ekonomi Syariah (S.E)

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Purwokerto, 28 Mei 2024

Pembimbing,



Miftaakbul Amri, S.sy.,

M.H.

NIP. 19920912 202012 1

012

**EFEKTIVITAS PENERBITAN SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN
INDUSTRI RUMAH TANGGA (SPP-IRT) SECARA DIGITAL ONLINE
SINGLE SUBMISSION (OSS) PADA USAHA MIKRO KECIL
MENENGAH (UMKM) DI KABUPATEN BANYUMAS**

**Habib Risnanto
NIM. 1717201191**

E-mail: habib.risnan121998@gmail.com

**Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

ABSTRAK

Berfokuskan pada pertumbuhan sektor usaha, masyarakat Indonesia dapat meningkatkan standar hidup mereka. Upaya tersebut untuk membuka lapangan usaha dengan memproduksi atau mendirikan usaha kecil yang sering disebut Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Dengan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai tata cara dan efektifitas penggunaan Sistem OSS.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara menggunakan sistem OSS dan tingkat efektifitas penerbitan SPP-IRT melalui Sistem OSS, serta untuk mengetahui dan menganalisa upaya-upaya dalam mengatasi hambatan tersebut. Dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, efektifitas pelayanan melalui sistem OSS dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terkhusus PLUT KUMKM Kabupaten Banyumas terhadap pelaku UMKM sudah cukup baik, tetapi masih terdapat kendala atau hambatan yang dialami baik dari dinas tersebut maupun dari pelaku UMKM. Setelah kegiatan penelitian, peneliti dapat memberikan saran kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan PLUT KUMKM Kabupaten Banyumas agar lebih aktif lagi dalam melaksanakan sosialisasi kepada pelaku UMKM mengenai cara penerbitan SPP-IRT melalui Sistem OSS.

Kata kunci: Efektivitas, UMKM, *Online Single Submission* (OSS)

**EFFECTIVENESS OF ISSUANCE OF HOUSEHOLD INDUSTRY FOOD
PRODUCTION CERTIFICATE (SPP-IRT) BY DIGITAL ONLINE
SINGLE SUBMISSION (OSS) TO MICRO, SMALL AND MEDIUM
ENTERPRISES (MSMES) in Banyumas Regency**

**Habib Risnanto
NIM. 1717201191**

E-mail: habib.risnan121998@gmail.com

**Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

ABSTRACT

Focusing on the growth of the business sector, Indonesians can improve their standard of living. The effort is to open business fields by producing or establishing small businesses which are often called Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). With a lack of public understanding of the procedures and effectiveness of using the OSS System.

This research aims to find out how to use the OSS system and the level of effectiveness of SPP-IRT issuance through the OSS System, as well as to find out and analyze efforts to overcome these obstacles. Conducted using descriptive qualitative research methods.

From the results of the research conducted, the effectiveness of services through the OSS system from the Investment and One-Stop Integrated Services Office, especially PLUT KUMKM Banyumas Regency, for MSME players is quite good, but there are still obstacles or obstacles experienced both from the agency and from MSME players. After the research activities, the researchers can provide suggestions to the Banyumas Regency Investment and One-Stop Integrated Service Office and PLUT KUMKM to be even more active in carrying out socialization to MSME players regarding how to issue SPP-IRT through the OSS System.

Keywords: Effectiveness, MSMEs, *Online Single Submission* (OSS)

MOTTO

“YOU ARE WHAT YOU THINK”

Kamu Adalah Apa Yang Kamu Fikirkan



HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah...Alhamdulillah...Alhamdulillahirrobbil'alamin.

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT, dengan segenap kerendahan hati penulis persembahkan karya sederhana ini kepada:

Kedua orang tua tercinta Bapak Nursaeran dan Ibu Sunarti, Guru ruhaniyah Syech Roghib Al Maskuri bersama Syech Rohimuddin Al Bantani serta isteri tercinta Febia Citraeni rusdaita, S.Farm yang senantiasa tak kenal lelah memberikan dukungan baik moril maupun materil, terimakasih atas segenap cinta, kasih sayang serta do'a yang tak pernah berhenti diberikan kepada penulis.

Segenap keluarga besar terimakasih atas do'a-do'nya selama ini. Serta teman-teman yang selalu menemani perjuanganku selama ini.

Terima kasih dan hormat ta'dzimku, kupersembahkan untuk dosen-dosenku atas semua bekal yang telah diberikan untuk saya.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf arab	Nama	Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	<u>H</u>	Ha (dengan garis di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
سین	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Šad	<u>S</u>	Es (dengan garis di bawah)
ض	D'ad	<u>D</u>	De (dengan garis di bawah)
ط	Ṭa	<u>T</u>	Te (dengan garis di bawah)
ظ	za	<u>Z</u>	Zet (dengan garis di bawah)
ع	'Ain	·	Koma terbalik di atas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	·	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta' addidah</i>
عِدَّة	Ditulis	Iddah

C. Ta' marbutah di akhir kata bila dimatikan tulis *h*

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>hikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كِرَامَةُ الْوَلِيَاءِ	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
------------------------	---------	--------------------

- b. Bila *ta'* marbutah hidup atau dengan *harakat*, *fathah* atau *kasrah* atau *dammah* ditulis *t*.

زَكَاةَ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakât al-fiṭr
-------------------	---------	---------------

D. Vokal pendek

َ	Fathah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	Dammah	Ditulis	U

E. Vokal panjang

1	Fathah + alif	Ditulis	A
	جَاهِلِيَّة	Ditulis	Jâhiliyah
2	Fathah + ya' mati	Ditulis	A
	تَنْسِي	Ditulis	Tansa
3	Kasrah + ya' mati	Ditulis	I
	كَرِيم	Ditulis	Karîm
4	Dammah + ya' mati	Ditulis	U
	فُرُوض	Ditulis	Furûd

F. Vokal rangkap

1	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قَوْل	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a' antum</i>
أَعِدَّتْ	Ditulis	<i>u' iddat</i>

H. Kata sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>Al-Qur'ân</i>
الْقِيَّاسُ	Ditulis	<i>Al-Qiyâs</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)* nya

السماء	Ditulis	<i>As-Samâ</i>
--------	---------	----------------

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذَوَى الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>Zawi al-furûd</i>
------------------	---------	----------------------

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur atas kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan berkah, rahmat, hidayah dan karunia-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat berjalan dan terselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW. yang telah membawa perubahan besar bagi peradaban dunia dengan memberi keteladanan yang berakhlak mulia.

Penulisan karya ilmiah ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pendidikan Strata Satu (S.1.) guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang berjudul “EFEKTIVITAS PENERBITAN SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA (SPP-IRT) SECARA DIGITAL ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) PADA USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DI KABUPATEN BANYUMAS”. Dalam penyelesaian tugas akhir ini, penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung dalam proses penelitian dan penyusunan tugas akhir ini, antara lain :

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Prof. Dr. H. Suwito, M.Ag., selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
3. Prof. Dr. H. Sulkhan Chakim, M.M., selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
4. Prof. Dr. H. Sunhaji, M. Ag., selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
5. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
6. Dr. H. Akhmad Faozan, Lc., M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

7. Prof. Dr. Hj. Tutuk Ningsih, M.Pd., selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
8. Dr. H. Chandra Warsito, M. Si., selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Dr. Ahmad Dahlan, M.S.I., selaku Ketua Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
10. Dewi Laela Hilyatin, M.S.I., selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
11. H. Sochimim, Lc., M. Si., selaku Koordinator Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
12. Miftaakhul Amri, S.E, M.H. selaku Dosen Pembimbing Penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi. Penulis mengucapkan banyak terima kasih karena telah meluangkan waktunya untuk memberi bimbingan, arahan, motivasi, masukan dan kesabaran demi terselesaikannya penulisan skripsi ini. Semoga senantiasa sehat dan mendapatkan perlindungan dari Allah SWT. atas kebaikan Bapak.
13. Segenap Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI
14. Segenap Staff Administrasi dan Staff Perpustakaan UIN PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI
15. Segenap Staf PLUT KUMKM JATENG Kabupaten Banyumas, terimakasih sebanyakbanyaknya kepada Semua Pelaku UMKM, yang sudah banyak membantu dalam memberikan informasi yang dibutuhkan penulis dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.

16. Orang tua tercinta Bapak Nur Saeran dan Ibu Sunarti terimakasih atas kasih sayang, dukungan dan do'anya selama ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
17. Guru ruhaniyah saya Syech Rohimuddin Al Bantani bersama Syech Roghib Al Maskuri yang senantiasa membimbing saya.
18. Isteri saya tercinta Febia Citraeni Rusdaita, S.Farm
19. Terima kasih kepada diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan di luar kendali dan tak pernah memutuskan untuk menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.
20. Terima kasih kepada sahabat - sahabat saya yang selalu memberikan semangat dan motivasi serta telah menemani saya dalam melakukan penelitian ini. Terima kasih kepada teman perjuangan kuliah yang selalu memberikan semangat dan support kepada saya. Serta terimakasih kepada teman skripsi saya selama di akhir perkuliahan ini.
21. Dan semua pihak yang telah membantu saya dan tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Tidak ada yang dapat penulis sampaikan kecuali ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya serta permohonan maaf. Semoga segala bantuan yang diberikan akan diberi balasan yang lebih baik oleh Allah SWT. Semoga bantuan dan kebaikan kalian mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah SWT. Penulisan skripsi ini tentunya masih banyak kekurangan dan kesalahan karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Semoga skripsi saya ini dapat bermanfaat untuk berbagai pihak.

Purwokerto, 26 Mei 2024



Habib Risnanto
NIM. 1717201191

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu	8
Tabel 4.1 Narasumber Berdasarkan Gender	50
Tabel 4.2 Narasumber Berdasarkan Usia	50
Tabel 4.3 Keadaan Narasumber berdasarkan Pendidikan.....	51
Tabel 4.4 Narasumber dari PLUT KUMKM dan pelaku UMKM.....	51



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Tampilan utama web OSS	45
Gambar 4.2 Tahapan penerbitan SPP-IRT	47



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT.....	v
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	ix
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	4
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	6
F. Kajian Pustaka.....	6
G. Sistematika Pembahasan	10
BAB II LANDASAN TEORI	11
A. Konsepsi Efektivitas	11
B. Konsep Perizinan	17
C. SPP-IRT (Perizinan Produksi UMKM)	20
D. Sistem Online Single Submission (OSS)	26
E. Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)	27
F. Landasan Teologis	29

BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis Penelitian.....	33
B. Tempat dan Waktu Penelitian	33
C. Objek dan Subjek Penelitian	33
D. Jenis dan Sumber Data	34
E. Teknik Pengumpulan Data.....	34
F. Uji Keabsahan Data.....	36
G. Teknik Analisis Data.....	37
BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	39
A. Deskripsi Umum UMKM Di Banyumas	39
B. Gambaran umum SPP-IRT	43
C. Cara Menggunakan Sistem Online Single Submission.....	44
D. Efektifvitas Penerbitan SPP-IRT Menggunakan digital Online Single Submission (OSS) di Kabupaten Banyumas	47
BAB V PENUTUP.....	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	74
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	82

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dengan berfokus pada pertumbuhan sektor usaha, masyarakat Indonesia dapat meningkatkan standar hidup mereka. Upaya tersebut untuk membuka lapangan usaha dengan memproduksi atau mendirikan usaha kecil yang sering disebut Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Menurut UU No. 20/2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), bisnis-bisnis ini digambarkan sebagai entitas yang produktif dan memenuhi kriteria, untuk hasil penjualan bersih tahunan yang diuraikan dalam undang-undang. UMKM biasanya tidak membutuhkan modal yang cukup besar, yang memungkinkan banyak orang untuk memulai dan menjalankan usaha di sektor ini.

Dampak wabah Covid 19 meluas ke aspek-aspek yang secara khusus memengaruhi perekonomian. Baik ekonomi lokal maupun dunia merasakan tekanan akibat meningkatnya infeksi Covid 19. Krisis kesehatan ini telah menyebabkan perlambatan banyak sektor. UKM berkesempatan untuk melangkah sebagai penyedia lapangan kerja selama masa krisis yang berpotensi menggantikan barang konsumsi atau manufaktur produk jadi. (Rais Agil Bahtiar, 2020).

Selama beberapa periode, usaha kecil dan menengah (UKM) telah terbukti menjadi sistem pendukung yang dapat diandalkan, dalam hal penciptaan lapangan kerja dan nilai tambah. Meningkatkan pertumbuhan UKM tidak hanya menguntungkan bisnis, tetapi juga memainkan peran penting dalam mempercepat proses pemulihan ekonomi di tingkat nasional. Mendukung pengembangan UKM adalah kunci untuk mendorong kemakmuran, di dalam suatu negara karena hal ini mengarah pada penciptaan lapangan kerja dan pemanfaatan sumber daya manusia yang optimal yang pada akhirnya berkontribusi pada pertumbuhan. (Singgih, 2007)

Kemerosotan keuangan yang terjadi pada tahun 1997 hingga 1998 menyebabkan kejatuhan banyak entitas bisnis. Namun, UMKM menjadi salah satu sektor yang berhasil bertahan. Antara tahun 1998 dan 2012, UMKM memiliki kapasitas untuk mempekerjakan dan mendukung antara 85 juta dan 107 juta orang. Jumlahnya mencapai 56.534.592 unit, atau 99,99% dari seluruh entitas bisnis di Indonesia, pada tahun 2012. (Suci, 2017) Sekitar 97,16%, atau 114 juta orang, dari penyerapan tenaga kerja pada tahun 2015 bersal dari UMKM (Kementrian Koperasi, 2015). Pada tahun 2017, UMKM ada sekitar 57,8 juta peserta di Indonesia, menurut data dari Kementerian Koperasi dan UMKM pada tahun 2014. Diperkirakan jumlah ini akan terus meningkat di tahun-tahun mendatang (Putra, 2016). Pada tahun 2022 jumlah UMKM di Indonesia mencapai lebih dari 64 juta. (Kementerian Koperasi, 2022) Ini artinya bahwa perkembangan UMKM di Indonesia setiap tahunnya meningkat. Salah satu jenis UMKM yaitu dalam sektor usaha dibidang kuliner.

Jumlah UMKM khususnya di Kabupaten Banyumas pada tahun 2022 adalah 8.545 unit sedangkan UMKM yang bergerak dibidang makanan dan minuman sebanyak 1.584 unit usaha atau sebanyak 18,54% dari total UMKM Kabupaten Banyumas (Persada, 2022). Karena makanan dan minuman berdampak pada kesehatan masyarakat, maka UMKM yang bergerak di bidang ini memerlukan SPP-IRT.

Hukum Islam menyatakan bahwasemua yang di konsumsi oleh umat Islam tidak hanya harus memiliki kualitas yang halal, tetapi juga harus thayyib, atau bermanfaat bagi tubuh, bebas dari bahaya, enak, dan tahan lama, sesuai dengan perintah Allah. Akibatnya, istilah "thayyiban" berubah menjadi 'illah (alasan untuk membolehkan sesuatu dikonsumsi). Disisi lain, makanan dan minuman diharamkan jika tidak memiliki kualitas thayyiban karena membahayakan kehidupan manusia dan bertentangan dengan pemeliharaan jiwa (hifz al-nafs). Maqasid al-Syariah menekankan pada pemeliharaan harta (hifz al-mal) dan akal (hifz al-aql). (Yanggo, 2013).

Ekonomi Islam memprioritaskan kepentingan masyarakat dan pribadi. Hal ini merupakan kewajiban agama dan sumber dorongan bagi setiap orang untuk memanfaatkan potensi mereka melalui kerja produktif. Tujuan dari SPP-IRT adalah untuk menjamin keamanan produk bagi pelanggan selama dikonsumsi untuk memastikan bahwa makanan dan minuman memenuhi ketentuan *thayyib*. (Dahlan, 2019)

Beberapa dokumen yang erat kaitannya dengan SPP-IRT adalah NIB (Nomor Induk Berusaha) dan sertifikasi halal. NIB sebagai dokumen resmi yang digunakan sebagai tanda usaha yang dijalani oleh UMKM tersebut adalah usaha yang formal dan mempermudah registrasi yang lainnya. Dokumen ini merupakan salah satu dokumen yang menjadi syarat pembuatan SPP-IRT. Pembuatan NIB dilakukan secara online dan diproses oleh petugas MPP (Mal Pelayanan Publik). Sedangkan penerbitan sertifikasi halal dibantu oleh penyelia halal.

Bupati/Walikota, bertindak melalui Dinas Kesehatan, mengeluarkan dokumen resmi yang disebut Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT). Dokumen ini berfungsi sebagai jaminan formal bahwa pangan yang diproduksi oleh Industri Rumah Tangga (IRT) telah memenuhi persyaratan keamanan selama tahap produksi dan pendistribusiannya. (Manovri Yeni & Susanti, 2022) Pentingnya SPP-PIRT adalah untuk menjamin keamanan produk ketika dikonsumsi oleh konsumen. Ketika produk UMKM memiliki SPP-PIRT berarti produk tersebut legal dipasarkan sehingga pemasaran produk akan lebih luas lagi. Persoalan yang menyebabkan UMKM belum memiliki SPP-PIRT adalah karena menganggap bahwa penerbitan SPP-PIRT tersebut sulit. Ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah serta regulasinya belum banyak yang tahu dan masyarakat mengerti.

Pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kinerja UMKM dengan mengimplementasikan PP Nomer 7 Tahun 2021. Kebijakan ini berfokus pada fasilitasi, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan UMKM agar dapat memperoleh SPP-PIRT. Kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan

UMKM; penerapan inkubasi; dan pendanaan khusus yang dialokasikan untuk kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan UMKM dan koperasi, semuanya dijelaskan dalam undang-undang ini.

Untuk dapat mengikuti program SPP-PIRT, peserta UMKM harus mengajukan permohonan SPP-PIRT kepada pemerintah daerah setempat, khususnya kepada Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu (UPTD) Dinas Kesehatan. Selanjutnya, permohonan tersebut akan diterima oleh bupati atau walikota, khususnya UPT yang Satu Pintu dengan Dinas Kesehatan. Karena adanya PP Nomor 7 Tahun 2021 maka penerbitan SPP-PIRT kali ini bisa sangat mudah yaitu dengan sistem online. Kemajuan teknologi yang sangat canggih tidak dapat dipungkiri telah memberikan banyak manfaat bagi masyarakat, terutama dalam bidang manajemen perizinan perusahaan. *Sistem Online Single Submission (OSS)* memiliki keunggulan daripada sistem manual yaitu tidak dikenakan biaya dan prosesnya tidak memakan banyak waktu.

Berdasarkan uraian yang diberikan, penulis berniat untuk membuat sebuah judul. **“Efektivitas Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) SECARA DIGITAL ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) PADA USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DI KABUPATEN BANYUMAS”** dan berupaya untuk mengetahui sejauh mana manfaat regulasi digital SPP-IRT *Online Single Submission (OSS)*.

B. Definisi Operasional

1. Efektivitas

Komponen utama dari setiap tindakan yang ditujukan untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan adalah efektivitasnya. Dengan kata lain, suatu kegiatan dianggap efektif jika kegiatan tersebut mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan. Menurut (Masruri and Muazansyah, 2017), Efektivitas didefinisikan sebagai tingkat di mana individu melaksanakan tugas sesuai dengan yang diinginkan dan menyelesaikannya dengan kualitas yang tinggi. Efektivitas mengacu pada

kemampuan suatu pekerjaan untuk berhasil diselesaikan dengan persiapan yang matang, memastikan bahwa pekerjaan tersebut dilakukan sesuai dengan waktu yang dialokasikan, anggaran, dan memenuhi tingkat kualitas yang diinginkan. Sementara itu, arti luas dari kemanjuran menunjukkan sejauh mana tujuan awal tercapai (Erawati et al., 2017).

2. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Usaha mikro adalah bisnis sukses yang dimiliki dan dioperasikan oleh individu atau kelompok kecil yang memenuhi syarat. Usaha Kecil adalah perusahaan yang menguntungkan yang dijalankan mandiri atau berorganisasi yang tidak memenuhi syarat sebagai anak perusahaan atau cabang perusahaan yang lebih besar yang memenuhi persyaratan atau yang dimiliki, dikendalikan, atau terlibat dalam beberapa cara oleh perusahaan menengah atau lebih kecil. (RI, 2021) Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 yang mengatur tentang UMKM (Usaha Kecil dan Menengah), Usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro disebut sebagai usaha mikro.

3. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)

Jaminan tertulis Bupati atau Walikota terhadap pangan yang diproduksi oleh IRTP di wilayahnya dalam rangka meningkatkan standar pangan yang diproduksi oleh IRTP disebut dengan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT). (BPOM, 2018)

4. Online Single Submission (OSS)

OSS adalah system Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS) merupakan Perizinan Berusaha yang diterbitkan Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, pimpinan lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota kepada pelaku bisnis melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

C. Rumusan Masalah

Dari uraian yang penulisan sampaikan, maka pokok persoalan yang penulis ambil berupa :

1. Bagaimana sistem pembuatan SPP-IRT secara digital *Online Single Submission* (OSS)?
2. Bagaimana Efektifitas Regulasi pembuatan SPP-IRT secara digital *Online Single Submission* (OSS) di Kabupaten Banyumas?

D. Tujuan Penelitian

Berikut adalah Tujuan dari penelitian yang berasal dari uraian masalah yang telah disebutkan di atas:

1. Untuk mengetahui sistem pembuatan SPP-IRT secara digital *Online Single Submission* (OSS).
2. Untuk mengetahui Efektivitas Regulasi pembuatan SPP-IRT secara digital *Online Single Submission* (OSS) di Kabupaten Banyumas.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti
Menjadi metode untuk mempraktikkannya sebagai mahasiswa ekonomi.
2. Bagi pembaca dan akademik
 - a. Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan dan menjadi bahan pertimbangan bagi para pelaku bisnis, sehingga memungkinkan mereka untuk memetik manfaat di kehidupan sekarang dan di kehidupan yang akan datang.
 - b. Hasil penelitian ini juga bermaksud untuk mendukung inisiatif pendidikan ilmiah Islam dan berfungsi sebagai sumber daya untuk penelitian berikutnya.

F. Kajian Pustaka

Dalam penulisan skripsi ini penelitian sebelumnya akan tercantum di bawah ini dan digunakan sebagai sumber:

Penelitian (Wisnumurti, 2022) berjudul “Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Pendaftaran Izin Usaha UMKMSecara Digital melalui Online Single Submission(OSS) di Kota Denpasar”, Penelitian bersifat sosiologis

dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris yang menggunakan data dari sumber primer dan sekunder.

Persamaan membahas proses dalam mendapatkan SPP-IRT. Peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif membahas efektifitas regulasi pelayanan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga (SPP-IRT) digital sedangkan Michsan Lubis membahas Efektivitas Peraturan Badan Pengawas Makanan No 22 Tahun 2018 terhadap SPP-PIRT

Penelitian (Ardiati, 2018) berjudul “Evaluasi Pelaksanaan Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) Di Banyuwangi”, merupakan penelitian observasional. Menunjukkan bahwa industri rumah tangga di Banyuwangi telah menerapkan sertifikasi produksi pangan sesuai dengan pedoman pemberian sertifikat produksi pangan industri rumah tangga. Penulis juga membahas tentang seberapa efektif sistem digital bekerja untuk layanan SPP-IRT.

Penelitian (Dewi et al., 2020) berjudul “Implementasi Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga di Provinsi Gorontalo”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi penerbitan SPP-IRT di Provinsi Gorontalo. Terdapat tiga DPMPTSP Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo yang telah memberikan SPP-IRT (Surat Izin Produksi Pangan) dengan rekomendasi yang diberikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, dan tiga DPMPTSP Kabupaten/Kota yang memanfaatkan *online single submission* (OSS) untuk layanan penerbitan SPP-IRT. Dalam artikel tersebut, penulis mengkaji efektivitas sistem digital, khususnya *online single submission* (OSS), dalam memfasilitasi penerbitan SPP-IRT bagi UMKM di Kabupaten Banyumas.

Penelitian (Hermanu and Handayani, 2019) berjudul “Optimalisasi Pelaksanaan Izin Edar Produk PIRT Melalui Pengembangan Sistem Keamanan Pangan Yang Berkelanjutan”, merupakan penelitian yuridis sosiologis. Penelitian ini melihat seberapa baik izin edar produk PIRT telah diimplementasikan sebagai langkah awal untuk menciptakan sistem keamanan pangan yang berkelanjutan. Perbedaan kepenulisan, penulis meneliti

menggunakan metode kualitatif deskriptif dan membahas mengenai efektifitas regulasi pelayanan SPP-IRT digital *online single submission* (OSS).

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

Nama dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
<p>Agung Gede Oka Wisnumurt (2022) berjudul “Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Pendaftaran Izin Usaha UMKMSecara Digital melalui Online Single Submission (OSS) di Kota Denpasar” JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Universitas Warmadewa, Indonesia).</p>	<p>Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Tujuan dari penelitian ini terkait kebijakan pendaftaran izin usaha UMKM secara digital online single submission (OSS) di Kota Denpasar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Kota Denpasar berdasarkan kategorisasi telah tercapai dan terlaksana dengan baik, meskipun hasil tersebut belum maksimal. Karena terkendala oleh pandemi Covid-19 yang terjadi sejak tahun 2020, kurangnya pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar dalam memberikan Layanan Pendampingan OSS kepada pelaku usaha di Kota Denpasar.</p>	<p>Persamaan : menguraikan proses untuk memperoleh Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) Perbedaan : terkait kebijakan pendaftaran izin usaha UMKM secara digital online single submission (OSS) di Kota Denpasar.</p>
<p>Fatma Nur Ardiati, “Evaluasi Pelaksanaan Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) Di Banyuwangi”, <i>Jurnal of Public Health</i></p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan standar pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga, industri rumah tangga di Banyuwangi telah tersertifikasi untuk produksi pangan. Merupakan</p>	<p>Persamaan : Membahas mengenai SPP-PIRT Perbedaan : Penulis menjelaskan mengenai membahas mengenai efektivitas regulasi secara digital</p>

<p><i>Research and Community Health Development</i> UNAIR, 2018.</p>	<p>penelitian observasional, Dinas Kesehatan Banyuwangi diwawancarai secara mendalam dan data dari hasil observasi dievaluasi untuk penelitian ini..</p>	<p>untuk pelayanan SPP-IRT sedangkan Fatma Nur Ardiati menjelaskan mengenai Standar pemberian SPP-IRT kemudian diikuti dalam pembentukan sertifikasi produksi pangan untuk usaha rumahan di Banyuwangi.</p>
<p>Retno Anggrina Khalistha Dewi, “Implementasi Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga di Provinsi Gorontalo”, Jurnal Mutu Pangan Institut Pertanian Bogor, 2020.</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi penerbitan SPP-IRT di Provinsi Gorontalo Tiga DPMPTSP Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo telah menggunakan <i>online single submission</i> (OSS) untuk pelayanan penerbitan SPP-IRT, dan tiga DPMPTSP Kabupaten/Kota telah menerbitkan SPP-IRT berdasarkan rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.</p>	<p>Persamaan : Membahas penerbitan SPP-IRT</p> <p>Perbedaan : Penulis membahas mengenai seberapa efektifnya sistem digital yaitu <i>online single submission</i> (OSS) dalam pelayanan penerbitan SPP-IRT terhadap UMKM di Kabupaten Banyumas sedangkan Retno Anggrina Khalistha Dewi dkk menjelaskan tahapan pada Peraturan BPOM No. 22 Tahun 2018 terkait dengan penerbitan SPP-IRT di Provinsi Gorontalo.</p>
<p>Bambang Hermanu, “Optimalisasi Pelaksanaan Izin Edar Produk PIRT Melalui Pengembangan Sistem Keamanan Pangan Yang Berkelanjutan”, Serat Acitya – Jurnal Ilmiah Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, 2017.</p>	<p>Penelitian ini menggunakan metode sosiologi hukum. Studi ini mengevaluasi efektivitas penerapan izin edar produk PIRT sebagai sarana untuk membangun sistem keamanan pangan yang berkelanjutan yang memerlukan pengembangan lebih lanjut.</p>	<p>Persamaan : Membahas mengenai SPPIRT</p> <p>Perbedaan : Penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif dan membahas mengenai efektifitas regulasi pelayanan SPP-IRT digital <i>online single submission</i> (OSS).</p>

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi ini meliputi :

BAB I Pendahuluan berisi Latar Belakang Masalah, Definisi Oprasional, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Sistematika Penulisan.

BAB II Landasan Teori. Bagian ini menjelaskan teori yang relevan terkait Efektifitas Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) Secara Digital OSS Terhadap Usaha ,Mikro ,Kecil Menengah (UMKM) Di Kabupaten Banyumas.

BAB III Metode Penelitian. Bagian ini mencakup informasi mengenai Jenis penelitian, Lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif, dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi pencatatan, wawancara, dan observasi. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif.

BAB IV Pembahasan Hasil Penelitian Pada bagian ini berisi tentang, deskripsi UMKM Kab. Banyumas, Efektifitas Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) Secara OSS Terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Kabupaten Banyumas.

BAB V Penutup. Bagian ini berisi kesimpulan yang ditarik dari studi dan rekomendasi yang dibuat untuk bagaimana Dinas UMKM dan Koperasi Kabupaten Banyumas dapat memperbaikinya di masa yang akan datang.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsepsi Efektivitas

1. Pengertian efektivitas

Sesuai dengan pernyataan (Simamora, 2021), efektivitas berfungsi sebagai konsep penting dalam memberikan gambaran yang komprehensif tentang tingkat pencapaian target atau tujuan. Prinsip efektivitas mengacu pada tingkat pencapaian dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu. (Ruwaina, 2019) menawarkan sudut pandang alternatif, dengan menyatakan bahwa "efektivitas" mencakup keadaan internal dan eksternal individu. Jumlahnya adalah 19. Menurut gagasan yang disajikan di atas, efektivitas adalah konsep yang signifikan dan mencakup semua hal yang berkaitan dengan tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan.

Sejalan dengan pandangan di atas, (Akni and Soedarto, n.d.) menyatakan bahwa suatu kegiatan, program, atau organisasi dianggap efektif jika outputnya dapat mencapai tujuan yang diinginkan karena adanya korelasi antara output dengan tujuan; semakin banyak output yang mengarah pada tujuan, maka semakin berhasil tujuan tersebut tercapai.

2. Ukuran efektivitas

Terdapat beberapa kriteria untuk menilai tingkat efektivitas kegiatan. Efektivitas, menurut (Irfandi et al., 2023), dapat dinilai dengan menggunakan beberapa cara sebagai berikut:

- a. Input
- b. Proses Produktivitas
- c. Output (hasil)
- d. Produktivitas

Menurut S.P. Siagian (1978) sebagaimana dikutip dalam (Simamora, 2021), keefektifan kriteria atau ukuran dalam mencapai tujuan dapat ditentukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Kejelasan tujuan mengacu pada kejelasan dan ketepatan tujuan yang diharapkan dapat dicapai oleh karyawan dalam pekerjaan mereka, dengan tujuan akhir untuk membantu karyawan secara individu dan bisnis secara keseluruhan dalam mencapai tujuan masing-masing.
- b. Taktik pencapaian tujuan harus jelas karena, seperti yang telah diketahui, taktik ini bersifat "on the road" dan digunakan dalam berbagai cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini membantu memastikan bahwa para pelaksana tetap berada di jalur yang benar dan mencapai tujuan perusahaan.
- c. Pendekatan metodis terhadap studi dan pembuatan kebijakan; kebijakan tersebut harus menghubungkan kegiatan operasional dengan tujuan yang sejalan dengan strategi dan sasaran yang telah ditetapkan.
- d. Membuat penilaian sekarang mengenai tindakan organisasi di masa depan pada dasarnya adalah inti dari perencanaan yang cermat.
- e. Deskripsi rencana yang baik sangat penting untuk pemrograman yang tepat karena tanpa deskripsi tersebut, para pelaksana tidak akan tahu bagaimana cara melanjutkan atau mengoperasikannya.
- f. Kemampuan untuk bekerja secara efisien adalah penentu utama efisiensi organisasi, seperti halnya ketersediaan ruang kerja dan fasilitas lainnya. Dengan menggunakan infrastruktur dan fasilitas yang dapat diakses yang dapat disediakan oleh organisasi.
- g. Efektivitas dan efisiensi program: Bahkan dengan program yang berhasil, organisasi tidak akan dapat mencapai tujuannya karena pelaksanaannya tidak akan mendekati tujuan tersebut.
- h. Sistem pengawasan dan pengendalian, dengan mempertimbangkan ketidaksempurnaan sifat manusia, dapat memberikan pengetahuan. Oleh karena itu, efektivitas organisasi memahami perlunya mekanisme kontrol dan pengawasan.

Kemudian, sesuai dengan (Murdyastutik et al., 2022) dijelaskan bahwa terdapat standar untuk menentukan keberhasilan sebuah program secara spesifik:

- a. *Effort* (Upaya), berkaitan dengan jumlah produk dan layanan yang disediakan, kualitasnya, dan seberapa baik produk dan layanan tersebut dieksekusi.
- b. *Cost Efficiency* (Efisiensi Biaya), terkait dengan harga pengiriman barang dan jasa dari suatu program, seperti kualitas hasil akhir dan hasil antara.
- c. *Result* (Hasil), digunakan untuk menggambarkan kemampuan program untuk menghasilkan hasil yang diinginkan, baik hasil antara maupun hasil akhir.
- d. *Cost Effectiveness* (Efektivitas Biaya), dalam kaitannya dengan total biaya. Ketersediaan efektivitas biaya terbatas hingga akhir tahun atau selama peninjauan program.
- e. *Impact* (Dampak), berkaitan dengan tanggapan terhadap pertanyaan-pertanyaan penilaian yang paling menantang, untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang hambatan yang dihadapi klien sebagai akibat dari ketertarikan mereka terhadap program serta hasil yang tidak akan mungkin bisa terjadi.

Keberhasilan rencana dapat dievaluasi dengan membandingkannya dengan prosedur yang sebenarnya, dengan mempertimbangkan hasil yang telah dicapai. (Lihardi, 2021) mengutip Campbell JP (1989: 121) yang mengatakan bahwa ada beberapa metode penting untuk mengukur keberhasilan secara umum. Metode-metode ini meliputi:

- a. Keberhasilan program

Keberhasilan program, (Lihardi, 2021) menurut Campbell J.P., keberhasilan dapat diukur dari sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai. Ketika mengimplementasikan Inisiatif ketenagakerjaan yang selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan, efektivitas program dapat dicapai melalui penggunaan model kapabilitas operasional. Terkait dengan prosedur dan cara kerja operasional lapangan, sebuah program dapat menjadi efektif.

b. Keberhasilan sasaran

Pencapaian tujuan dengan penekanan pada komponen output dapat digunakan untuk menentukan efektivitas, yang berarti bahwa sejauh mana program atau kebijakan pemerintah memenuhi target mereka dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan mereka. Dengan kata lain, evaluasi efektivitas perlu dikaitkan dengan masalah tujuan dan sasaran.

c. Kepuasan terhadap program

Salah satu aspek dari efektivitas adalah kepuasan, yaitu sejauh mana tuntutan pengguna terpenuhi sebagai hasil dari keberhasilan program. Persepsi pengguna terhadap kualitas program yang dihasilkan dapat digunakan untuk menentukan apakah mereka puas atau tidak. Tingginya tingkat kepuasan pengguna dan kualitas program saling berkorelasi, sehingga memungkinkan evaluasi yang akurat terhadap program oleh para pengambil keputusan dan pelaksana-dalam hal ini pemerintah.

Sesuai dengan definisi ini, kualitas program-yang didefinisikan oleh DeLone dan McLean sebagai sistem, informasi, dan kualitas layanan-adalah indikator utama kepuasan program.

a. Kualitas Sistem

Mengenai komponen-komponen sistem informasi, termasuk peralatan fisik (perangkat keras) dan program (perangkat lunak), kualitas sistem mengacu pada kemampuan sistem itu sendiri. Beberapa indikator dapat digunakan untuk menilai kualitas sistem,(Setyaningtyas et al., 2023) menurut DeLone dan McLean (2003). Indikator-indikator tersebut antara lain:

1) Kemudahan Penggunaan

Kemudahan penggunaan dan desain yang berpusat pada pengguna merupakan ciri khas dari sistem informasi yang berkualitas tinggi.

2) Kecepatan Akses

Hal ini mencakup pengukuran dengan menggunakan waktu reaksi dan kecepatan pemrosesan.

3) Keandalan Sistem

Hal ini mengacu pada ketahanan sistem terhadap kesalahan dan kerusakan.

4) Fleksibilitas

Hal ini mengacu pada kemampuan sistem informasi untuk berubah untuk memenuhi kebutuhan pengguna.

5) Keamanan mengacu pada sistem yang menyimpan informasi pengguna dengan aman.

b. Kualitas Informasi

Menurut kualitas informasi, laporan yang dihasilkan oleh sistem atau output dari sistem informasi diukur kualitasnya. Kualitas informasi dipengaruhi oleh:

1) Relevan

Informasi harus dapat memberikan manfaat bagi pengguna dengan cara tertentu.

2) Akurat

Hal ini menyiratkan bahwa data harus bebas dari kesalahan dan memiliki tujuan yang jelas.

3) Tepat waktu

Informasi yang dibuat atau dibutuhkan tidak boleh ditunda.

4) Dapat dipercaya

Agar konsumen dapat menggunakan informasi dengan segera, informasi tersebut harus akurat dan dapat diandalkan dalam kenyataannya.

c. Kualitas Pelayanan

Kualitas layanan adalah perbedaan antara kualitas layanan yang diharapkan klien dan kualitas layanan aktual yang mereka terima.

(Puteri et al., 2022). Kepastian, fokus, dan ketepatan waktu adalah indikator dari layanan berkualitas tinggi.

d. Tingkat input dan output

Di sini, efisiensi ditentukan dengan membandingkan nilai input dan output yang dihasilkan; sebuah operasi dianggap efisien jika outputnya melebihi inputnya. Menurut salah satu interpretasi, efisiensi adalah metrik keberhasilan yang ditentukan oleh seberapa besar biaya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan kegiatan yang dilakukan. Semua sumber daya penting yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas atau melaksanakan program disebut sebagai input. Sebaliknya, output mengacu pada dampak langsung dari suatu program terhadap pelanggan layanan.

e. Pencapaian tujuan menyeluruh

Hal ini menghasilkan evaluasi keseluruhan dari efektivitas organisasi dan menunjukkan penilaian umum dari kriteria tertentu. Kemampuan organisasi untuk memenuhi kewajibannya dalam menerapkan sistem untuk memenuhi tujuan yang telah ditetapkan dapat digunakan sebagai indikator sifat ini.

Efisiensi strategi pemerintah dalam melakukan transisi dari sistem manual ke sistem daring untuk mengurus perizinan perusahaan tercermin dari keberhasilan sistem OSS. Terdapat lima indikator: pencapaian tujuan secara keseluruhan, tingkat input dan output, kepuasan program, keberhasilan target, dan keberhasilan program diusulkan oleh Campbell JP (1989) dalam (Lihardi, 2021) digunakan oleh para peneliti dalam investigasi ini. Para peneliti menggunakan teori ini karena, berdasarkan temuan investigasi mereka, indikasi dalam teori tersebut mengarah pada ciri-ciri masalah yang perlu dilihat. Dengan demikian, dalam (Lihardi, 2021), peneliti menggunakan teori pengukuran efektivitas Campbell J.P. (1989) untuk memastikan keefektifan Sistem *Online Single Submission* (OSS) DPMPSTSP Kabupaten Banyumas untuk perizinan usaha.

B. Konsep Perizinan

1. Pengertian perizinan

Berge (2000:20) mendefinisikan perizinan sebagai izin dan kewenangan untuk menyimpang dari hukum dalam situasi tertentu, berdasarkan peraturan pemerintah atau hukum itu sendiri.

Manan (2001:16) mendefinisikan perizinan sebagai izin dari penguasa untuk melakukan perbuatan atau kegiatan tertentu yang biasanya dilarang, mengikuti pedoman yang ditetapkan oleh hukum.

Pendapat para ahli dan deskripsi yang diberikan menunjukkan bahwa perizinan adalah kegiatan pemerintah yang diatur oleh hukum dan peraturan yang mengontrol peristiwa tertentu sesuai dengan protokol dan persyaratan yang telah ditetapkan.

2. Unsur perizinan

a. Instrumen Yuridis

Mengejar kesejahteraan umum adalah tugas otoritas pemerintah selain menegakkan hukum dan ketertiban. Tanggung jawab tradisional pemerintah untuk menegakkan keamanan dan ketertiban masih dilakukan hingga saat ini. Untuk melakukan hal ini, pemerintah diberikan yurisdiksi di bidang regulasi. Dari peran pengaturan ini, berbagai perangkat hukum dikembangkan untuk menangani kejadian-kejadian spesifik dan nyata, terutama dalam bentuk keputusan, tergantung pada karakteristiknya.

b. Landasan negara hukum adalah gagasan bahwa peraturan dan regulasi membentuk dasar pemerintahan.

Dengan kata lain, kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dan peraturan yang relevan harus menjadi dasar untuk semua tindakan hukum yang diambil oleh pemerintah, baik dalam menjalankan tugas-tugas yang berhubungan dengan peraturan atau pelayanan. Pemerintah mengambil tindakan hukum dengan bertindak dan mengeluarkan ketentuan perizinan. Agar suatu kegiatan dapat dianggap sah, kegiatan tersebut harus didasarkan pada asas legalitas

atau memiliki kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Jika tidak ada dasar kewenangan, maka gugatan tersebut batal demi hukum. Karena ketetapan izin batal demi hukum tanpa dasar kewenangan, dasar dari pemberian dan penerbitan izin haruslah kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Organ Pemerintahan

Badan-badan yang mengelola urusan pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah dikenal sebagai organ pemerintahan. Sjahrhan Wet menyatakan bahwa setelah melakukan penelusuran terhadap berbagai ketentuan administrasi pemerintahan, ditemukan bahwa izin dapat diberikan oleh berbagai organ pemerintahan, termasuk badan-badan, berdasarkan kedudukannya baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, mulai dari organ pemerintahan yang paling tinggi (presiden) sampai dengan organ pemerintahan yang paling rendah (lurah)(Sharon, 2021).

Apapun jenis administrasi negara atau cabang pemerintahan yang memberikan izin, satu hal yang pasti: izin hanya dapat diperoleh melalui badan yang berwenang. Dan badan-badan administratif negara atau cabang-cabang pemerintahan hampir selalu terlibat. Dalam hal ini, badan-badan tersebut berada di bawah kendali lokal. Berbagai badan pemerintah yang memiliki wewenang untuk mengeluarkan izin dapat menghambat atau bahkan mencegah operasi tertentu untuk mencapai tujuan yang dimaksudkan. Hal ini mengindikasikan bahwa pengenaan persyaratan lisensi oleh pemerintah dapat menyebabkan mereka yang terlibat dalam kegiatan yang memerlukan lisensi menjadi bosan.

d. Kebutuhan akan Prosedur

Protokol yang ditetapkan pemerintah sering kali diikuti saat mengajukan permohonan lisensi, yang bertindak sebagai pengizin, selain memenuhi standar spesifik yang ditetapkan pemerintah atas

kebijakannya sendiri. atau lembaga pemberi izin, pemberi izin, dan tujuan izin.

Lisensi berisi ketentuan-ketentuan yang bersifat konstitutif dan bersyarat. Izin tersebut memutuskan perilaku atau perbuatan apa pun yang dipenuhi, yang menjadikannya konstitutif. Dengan kata lain, pemberian izin diatur oleh klausul tertentu yang, jika tidak diikuti, dapat mengakibatkan hukuman. Bersyarat karena evaluasi hanya dapat dilihat dan diamati setelah kegiatan atau tindakan yang ditentukan. Pemerintah membuat keputusan tentang persyaratan dan prosedur perizinan secara eksklusif. Di sisi lain, pemerintah tidak dapat secara sewenang-wenang membuat atau memutuskan kebijakan dan peraturan. Pemerintah harus mematuhi peraturan dan hukum. Ini berfungsi sebagai fondasi lisensi.. Dengan pengertian lain, lisensi belum dapat diberikan berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah yang melebihi tujuan yang ditetapkan dalam undang-undang yang mengatur.

e. Peran dan maksud dari perizinan

Pengertian lain izin yaitu alat hukum untuk membujuk orang untuk mengikuti tindakan yang ditentukan untuk mencapai tujuan tertentu. Izin berfungsi sebagai alat yang mengarahkan instrumen hukum dalam kapasitasnya penertib, insinyur, dan melayani masyarakat dengan adil. Ini berarti menunjukkan bahwa adalah mungkin untuk mengamati bagaimana gagasan masyarakat yang kaya dan adil dicapai melalui izin. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi yang disebutkan dalam izin berfungsi sebagai kontrol untuk operasi izin yang sebenarnya. Dalam hal izin berfungsi sebagai alat kontrol dan perwujudan masyarakat yang adil dan makmur-sebagaimana yang disyaratkan oleh alinea keempat Pembukaan UUD 1945-maka izin ini harus disusun dan diatur dengan tepat. Izin harus selalu diperoleh secara tertulis karena statusnya sebagai dokumen resmi.

C. SPP-IRT (Perizinan Produksi UMKM)

1. Pengertian perizinan PIRT

Rumah, secara harfiah, berarti tempat tinggal atau kampung halaman seseorang. Di sisi lain, di dalam KBBI mendefinisikan industri berperan untuk pemanfaatan fasilitas dan mesin untuk meningkatkan atau memodifikasi produk.

Dalam kategori industri, dibagi dalam 4 golongan sebagai berikut:

- a. Sektor rumah tangga/kerajinan tangan mempekerjakan satu hingga empat orang dan biasanya dijalankan secara paruh waktu dan bersifat kekeluargaan. Upah yang dibayarkan kepada karyawan tidak diperhitungkan dalam perhitungan harga; jika diperhitungkan, administrasinya biasanya terbatas pada catatan numerik.
- b. Usaha kecil yang mempekerjakan lima hingga sembilan belas orang. Tenaga kerja diperhitungkan dalam perhitungan ini. Ini biasanya merupakan sumber pendapatan utama, dan administrasi langsung digunakan.
- c. Dibandingkan dengan industri kecil, industri menengah mempekerjakan 20-99 orang, sehingga berada pada tingkat yang lebih tinggi.
- d. Industri yang cukup besar yang, tentu saja, perlu dikelola dengan baik, mempekerjakan lebih dari 100 orang.

Dengan demikian, seseorang dapat menganggap industri rumahan sebagai perusahaan kecil atau bisnis rumahan yang menjual barang. Karena bisnis semacam ini terkonsentrasi di rumah, maka disebut sebagai perusahaan kecil. Tenaga kerja di industri rumah tangga terdiri dari kurang dari empat orang. Anggota keluarga menyediakan tenaga kerja, modal yang digunakan relatif kecil, dan manajer atau pemilik biasanya adalah anggota rumah tangga atau pemimpin rumah tangga.

Produk makanan olahan yang diedarkan di sekitar masyarakat harus mencantumkan label Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT). Pembelian barang olahan dalam kemasan akan mencantumkan

istilah P-20 IRT, MD, ML, atau SP. Semua istilah ini berkaitan dengan arti nomor registrasi produk yang terdaftar di Kementerian Kesehatan.

2. Kriteria Usaha Industri Rumah Tangga

Standar-standar berikut ini harus dipenuhi oleh sebuah perusahaan untuk dapat diklasifikasikan sebagai industri rumah tangga:

- a. Pekerjaan rumah tangga dilakukan dalam skala industri.
- b. Tidak lebih dari tiga orang pekerja yang terlibat.
- c. Menggunakan berbagai alat pengolahan, dari yang manual hingga semi otomatis.

Perusahaan makanan yang beroperasi di daerah pemukiman dan memiliki peralatan pengolahan makanan manual atau semi-otomatis diklasifikasikan sebagai perusahaan makanan keluarga, sesuai dengan Pasal 1 Butir 16 Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, Gizi, dan Pangan.

Barang atau jasa yang diproduksi diklasifikasikan sebagai produk oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia, diberi nilai tambah selama proses pembuatan, dan kemudian digunakan sebagai produk akhir. Definisi ini juga berlaku untuk pangan. Makanan, di sisi lain, mengacu pada makanan jadi yang telah disiapkan untuk diperdagangkan. Dalam hal produk makanan yang dihasilkan oleh industri rumah tangga, ini adalah barang yang dibuat untuk dipertukarkan di dalam masyarakat. Barang-barang makanan dari industri rumah tangga sangat rentan terhadap kerusakan karena makanan mudah rusak dan harus dipertimbangkan dengan cermat saat membuatnya, bersama dengan kuantitasnya.

3. Prosedur Perizinan IRT

Prosedur untuk mendapatkan izin PIRT adalah sebagai berikut, sesuai dengan norma-norma yang ditetapkan dalam peraturan BPOM Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga:

a. Penerimaan permohonan SPP-IRT yang diajukan

Permohonan akan dinilai kelayakan dan kelengkapannya oleh Bupati/Walikota cq. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Evaluasi ini berupa :

1) Data yang untuk pendaftaran sebagai berikut :

- a) Jenis makanan
- b) Label produk
- c) Bentuk kemasan
- d) Berat bersih produk (mg/g/kg atau ml/l/kl)
- e) Bahan bahan produk
- f) Cara pembuatan produk
- g) Identitas sesuai KTP
- h) Nama pengusaha
- i) Nama penanggung jawab
- j) Tahun kedaluwarsa
- k) Deskripsi kemasan produk

2) Surat pendukung pendaftaran :

- a) SKU dari pemerintah daerah terdekat
- b) Gambaran kemasan produk

Permohonan SPP-IRT harus memenuhi persyaratan yang telah diuraikan di atas sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh BPOM (nomor HK.03.1.23.04.12.2205 tahun 2012) mengenai aturan pemberian SPPIRT. Permohonan diajukan kepada kepala daerah yang di tindak lanjuti oleh dinas kesehatan.

b. Penyelenggaraan Penyuluhan Keamanan Pangan

- 1) Dinas kesehatan Kabupaten/Kota, bersama dengan Bupati atau Walikota, bertanggung jawab untuk melaksanakan program Penyuluhan Keamanan Pangan.
- 2) Pemenuhan prasyarat untuk ditetapkan sebagai PKP adalah PNS yang dipilih oleh Bupati/Walikota pada Dinas kesehatan

Kabupaten/Kota, dan memiliki sertifikat kompetensi di bidang penyuluhan keamanan pangan dari BPOM.

- 3) Tenaga PKP terampil dari Balai Besar/Balai POM dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sebagai narasumber penyuluhan keamanan pangan.
- 4) Pemilik IRTP atau penanggung jawab IRTP menjadi peserta penyuluhan keamanan pangan.
- 5) Materi Keamanan Pangan yang digunakan dalam penyuluhan antara lain:
 - a) Pengetahuan pangan utama
 - (1) Hukum yang mengatur sektor pangan
 - (2) Standar gizi dan kebersihan
 - (3) Teknologi pengolahan makanan
 - (4) Prosedur operasional higienis (SSOP)
 - (5) Cara produksi pangan yang baik untuk industri rumah tangga (CPPB-IRT).
 - (6) Cara menambahkan BTP
 - (7) Syarat pelabelan dan Promosi Pangan
 - b) Materi Pendukung
 - (1) Pencantuman label Halal
 - (2) Etika Bisnis dan Pengembangan Jejaring Bisnis IRTP
- 6) Metodologi penyampaian untuk keamanan pangan materi tentang keamanan pangan disajikan melalui diskusi, debat, pemutaran film, pameran, dan metode lain yang membantu pemahaman tentang keamanan pangan.
- 7) Sertifikat PKP
 - a) Skor penilaian minimum 60 adalah nilai minimal kelulusan untuk bisa mendapatkan sertifikat PKP
 - b) Sertifikat PKP memiliki sistem penomoran sebagai berikut: contoh nomor Sertifikat penyuluhan keamanan pangan ada tiga kolom, sembilan angka: 987 / 6543 /21

Ini adalah nomor-nomor yang tersedia:

- a) Yang telah mendapatkan nomor tersebut ditunjukkan dengan angka 9, 8, dan 7 pada Kolom I.
- b) Provinsi, kabupaten, dan kota tempat penyuluhan keamanan pangan diberikan ditunjukkan dengan angka ,6, 5, 4 dan 3 pada Kolom II.
- c) Tahun penerbitan sertifikat ditunjukkan oleh angka ke-2 dan ke-1 pada Kolom III.

BPOM Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Nomor HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 tentang pedoman pemberian SPPIRT dengan pedoman yang harus dipatuhi oleh penyuluhan.

c. Pengecekan pemberian PIRT

- 1) Pemilik atau pihak yang bertanggung jawab mendapatkan sertifikat penyuluhan keamanan pangan sebelum melakukan inspeksi fasilitas.
- 2) Pengawas pangan dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, di bawah arahan Bupati/Walikota c.q., melakukan inspeksi sarana produksi pangan IRT berdasarkan surat tugas.
- 3) Pegawai kompetensi pengawasan dari BPOM wajib memenuhi persyaratan untuk menjadi pengawas pangan Kabupaten/Kota.
- 4) Persetujuan BPOM RI tentang protokol pengecekan produksi pangan dalam negeri diikuti saat melakukan pemeriksaan sarana IRTP.
- 5) SPPIRT akan di berikan jika dari hasil pengecekan produksi menunjukkan bahwa IRTP sesuai dengan persyaratan.

Proses pemeriksaan sarana produk pangan industri rumah tangga akan dimulai setelah pelaku usaha menyelesaikan tahap penyuluhan keamanan dan dinyatakan memenuhi syarat untuk melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu pemeriksaan sarana produksi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh BPOM Republik Indonesia

(nomor HK.03.1.23.04.12.2205 tahun 2012) tentang penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga.

d. Pemberian Nomor P-IRT

- 1) Identitas P-IRT paling sedikit terdiri dari Lima Belas (15) digit: Nomor P-IRT. 1234567890123-45.
- 2) Berikut ini 15 digit yang ada di penomoran SPPIRT:
 - a) Sesuai dengan Lampiran 5, digit pertama merupakan kode jenis kemasan.
 - b) Sesuai dengan Lampiran 6, digit kedua dan ketiga merupakan nomor urut jenis pangan IRTP.
 - c) Sesuai Lampiran 4, kode provinsi dan kabupaten/kota ditunjukkan dengan angka keempat, kelima, keenam, dan ketujuh.
 - d) Angka 8 dan 9 merupakan nomor urut jenis pangan IRTP yang telah mendapatkan SPP-IRT.
 - e) Angka 10 sampai dengan angka 13 merupakan nomor urut IRTP di kabupaten atau kota yang bersangkutan.
 - f) Tahun kedaluwarsa ditunjukkan oleh angka 14 dan 15.
- 3) 1 nomor para SPPIRT itu untuk 1 jenis produk.
- 4) Badan yang ditunjuk untuk menerbitkan kode provinsi, kabupaten, dan kota menyesuaikan penomoran untuk mencerminkan setiap modifikasi, baik yang melibatkan penambahan atau penghapusan provinsi, kabupaten, atau kota.

Menurut Peraturan tentang Penawaran Izin Produksi Pangan Industri Rumah Tangga, yang diberikan oleh BPOM (HK.03.1.23.04.12.2205 tahun 2012), pelaku usaha hanya akan mendapatkan nomor PIRT untuk produknya jika semua tahapan dinilai memadai dan memenuhi syarat untuk mendapatkan izin PIRT dari Dinas Kesehatan.(Amalia, 2022)

D. Sistem Online Single Submission (OSS)

Lembaga OSS menerbitkan Sistem online single submission (OSS), yang biasa disebut sebagai perizinan usaha terintegrasi secara elektronik, kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi atas nama gubernur, bupati/wali kota, kepala lembaga, dan menteri. (Rahayu et al., n.d.) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Digital, yang kemudian menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, mengamanatkan penerapan OSS. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, yang membahas pengenalan perizinan berusaha berbasis risiko, menyatakan dalam pasal 1 ayat (1) bahwa "*Memperoleh izin usaha memberikan kewenangan kepada sebuah organisasi untuk meluncurkan dan mengelola sebuah usaha atau kegiatan lainnya.*"

"Tingkat risiko kegiatan usaha menjadi pertimbangan dalam pemberian izin usaha kepada pelaku usaha agar dapat memulai dan menjalankan kegiatan usaha secara komersial," demikian bunyi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang menjadi dasar dari *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA). Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, khususnya Pasal 10 ayat (1) dan (2), kegiatan usaha diklasifikasikan ke dalam empat kategori berdasarkan tingkat penilaian risiko. Kategori tersebut antara lain kegiatan usaha dengan risiko rendah, risiko rendah, risiko menengah, dan risiko tinggi. Klasifikasi kegiatan usaha didasarkan pada tingkat bahaya, kemungkinan terjadinya bahaya, tingkat risiko, dan peringkat skala usaha. Perizinan usaha dilakukan dengan menilai tingkat risiko skala usaha serta peringkat skala usaha sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perlindungan, Pemberdayaan, dan Kemudahan UMKM.

E. Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)

1. Pengertian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

UMKM adalah usaha komersial yang berpotensi menciptakan lapangan kerja, berkontribusi secara signifikan terhadap proses pemerataan dan pertumbuhan ekonomi untuk mencapai kesejahteraan.

Menurut Undang-Undang Nomor 20, 2008, ketentuan umum Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah sebagai berikut:

- a. Perusahaan mikro adalah perusahaan yang menguntungkan yang dijalankan oleh orang perorangan atau organisasi bisnis perorangan yang memenuhi persyaratan untuk perusahaan mikro.
- b. Suatu usaha yang dilakukan oleh sendiri dan berdiri sendiri tanpa ada kaitan dengan perusahaan lain adalah usaha kecil.
- c. Usaha yang berdiri sendiri yang dijalankan oleh orang atau organisasi yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang lebih besar, atau usaha kecil yang dimiliki, dikendalikan, atau terlibat dalam beberapa cara dengan usaha kecil dengan kekayaan bersih atau penjualan tahunan dan di atur oleh undang undang yakni usaha menengah.

2. Fungsional UMKM

Menurut (Fachrunnisa, 2017), kinerja UMKM ditentukan oleh usaha yang dilakukan oleh karyawan yang beradaptasi dengan peran dan tanggung jawabnya di perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Kinerja ini dikaitkan dengan standar atau ukuran tertentu dalam perusahaan tempat karyawan tersebut bekerja. Salah satu tujuan paling penting dari manajemen keuangan adalah kinerja UMKM, yang dicapai dengan meningkatkan nilai perusahaan dan kekayaan pemiliknya.

Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan serta waktu, menurut (Mulyadi, 2014). Sedangkan kinerja, seperti yang didefinisikan oleh Rivai dan Basri (2005:14-15) dalam jurnal (Widyastuti and Rahardja, n.d.), adalah hasil

atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan di dalam suatu organisasi dalam suatu kurun waktu tertentu selama menyelesaikan kegiatan dibandingkan dengan kemungkinan, seperti target, hasil kerja, sasaran, atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu. Kinerja UMKM, yang merupakan hasil atau prestasi yang dipengaruhi oleh kegiatan operasional usaha dalam menggunakan sumber daya yang dimiliki, merupakan representasi keadaan secara umum dari perusahaan selama periode waktu tertentu.

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kinerja UMKM ditentukan dengan mengevaluasi seluruh hasil kerja mereka terhadap kriteria, tujuan, target, dan hasil yang legal.

3. Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Fungsional UMKM

(Munizu, n.d.) menyatakan bahwa faktor internal dan eksternal adalah dua kategori faktor yang berdampak pada fungsional UMKM:

a. Faktor Internal

Elemen internal sangat penting dan berfungsi sebagai landasan untuk meningkatkan kekuatan organisasi dan mengatasi kekurangannya. Menurut David (2009) (Pamungkas, n.d.), faktor internal mencakup elemen-elemen yang berkaitan dengan operasi, keuangan, teknologi, sumber daya manusia, pemasaran, dan pasar. Untuk mencapai misi, tujuan, dan sasarannya, organisasi dapat memanfaatkan karakteristik internal yang menguntungkan. Hal ini terdiri dari informasi dan kemampuan, tenaga penjual yang berpengalaman, persepsi publik yang baik, dan elemen-elemen lainnya.

b. Faktor Eksternal

Aspek-aspek dari luar perusahaan yang dapat memberikan dampak pada perusahaan dikenal sebagai faktor eksternal. (Susanthi, 2017) Pearce II dan Robinson (2013) menyatakan bahwa variabel-variabel dari luar memiliki dampak pada proses pengambilan keputusan perusahaan tentang tindakannya. Terdapat tiga kategori faktor eksternal, yaitu lingkungan industri, yang meliputi hambatan

masuk, kekuatan pembeli, kekuatan pemasok, dan ketersediaan produk pengganti; lingkungan operasional, yang meliputi pesaing, pemberi pinjaman, pelanggan, pasar tenaga kerja, dan pemasok; dan lingkungan yang jauh, yang meliputi faktor ekonomi, sosial, politik, teknologi, dan ekologi. Menurut (Santiago and Hidayatulloh, 2019), pengaruh eksternal meliputi aspek sosial, budaya, dan ekonomi, kebijakan pemerintah di sektor publik, dan fungsi organisasi terkait.

F. Landasan Teologis

UMKM punya peran penting dalam Pembangunan Nasional maka diperlukan produk keunggulan yang berdaya saing, dan nilai alami atau absolut dan nilai yang diperoleh. Dengan manfaat tersebut maka pengetahuan UMKM, keterampilan mengelola UMKM, kemampuan pengembangan UMKM, sikap disiplin mengatur keuangan UMKM dan perilaku yang proposional sangat diperlukan dalam mengelola UMKM (Ichsan, Lubis, Hartin, & Panggabean, 2023). Untuk mendorong terwujudnya hal tersebut maka diperlukan sumber daya insani yang berkualitas. Dukungan dan kerjasama serta kolaborasi dalam membangun UMKM juga sangat diperlukan.

Bisnis dalam pandangan Islam sering dikenal dengan nama Ijarah, yakni mengelola harta benda yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Dalam bisnis islam mencari keuntungan tersebut bukan hanya terfokus pada materi saja, namun untuk memperoleh ridho Allah SWT. Oleh karena itu bisnis syariah atau bisnis Islam merupakan bisnis yang berpedoman pada Al-Quran dan Hadits yang tidak hanya memuat mengenai urusan di dunia melainkan di akhirat.

Islam memiliki dasar dalam mengerjakan berbagai amalan, dasar tersebut ialah Al-Quran dan Hadits. Sebagaimana sumber ajaran agama islam menerapkan prinsip Islam dalam melakukan usaha yang disesuaikan dengan perkembangan zaman hal ini sering kali menjadi tantangan kehidupan. AlQuran dapat dibagi sebagai pedoman untuk meningkatkan usaha dengan lebih baik atas tatanan kehidupan berwirausaha.

1. Usaha Mikro Kecil Menengah

Usaha menurut perspektif ekonomi Islam adalah suatu usaha yang tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, dengan berpegang teguh pada Al-Quran dan Hadits. Hal tersebut menjadi suatu landasan yang dapat mengarahkan agar tetap menjalankan bisnis dengan adil dan benar. Landasan-landasan inilah yang menjadi dasar atau hukum dalam menjalankan suatu usaha. Nabi Muhammad merupakan salah satu suri tauladan bagi seluruh umat. Nabi Muhammad diturunkan untuk menyempurnakan ajaran-ajaran Tuhan yang sebelumnya telah ada, Allah SWT berfirman pada QS. Al-Ahzab (33) 21:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ آخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ
كَثِيرًا

Artinya: *Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari Kiamat dan yang banyak mengingat Allah.*

Nabi Muhammad selain sebagai pedagang yang sukses beliau juga sebagai pemimpin negara yang sukses. Maka sebenarnya kita telah menemukan figure teladan dan juga wajib dijadikan sebagai contoh dalam berbisnis. Nabi Muhammad menyarankan umatnya untuk berbisnis (usaha) karena dengan melakukan suatu usaha dapat menimbulkan sebuah kemandirian tanpa bergantung terus menerus kepada orang lain. Allah berfirman dalam QS. An-Naba (78) ayat 11: 40

وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا

Artinya: *dan kami menjadikan siang untuk mencari penghidupan, Dari ayat tersebut dapat diketahui petunjuk yang telah diberikan oleh Allah SWT untuk melakukan dagang atau usaha serta beberapa kegiatan lain agar seseorang dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya.*

Allah juga berfirman dalam QS. Al-Jumu'ah (62) ayat 10:

فَإِذَا فُضِّيتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ

Artinya: Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu dibumi, carilah karuna Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung.

Ayat tersebut memberikan motivasi ataupun petunjuk dalam melaksanakan bisnis, dimana ketika kita telah selesai melaksanakan kewajiban kita salah satunya yaitu salat, maka kita dianjurkan untuk mencari karunia Allah dalam kehidupan.

2. Pelayanan

Pelayanan berarti memberikan suatu layanan atau bantuan kepada orang yang memerlukan (Widad, Pauzi, & Prayoga, 2020). Dalam tindakan tersebut tercermin perilaku terpuji. Dalam QS. Ali ‘Imran ayat 159 disebutkan bahwa:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأَنْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ ۚ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۚ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya: Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal.

Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah menjadikan nabi Muhammad SAW sebagai sosok yang mudah berinteraksi, santun dalam bertutur kata dan memberi nasihat dengan penuh kelembutan. Seandainya Nabi Muhammad SAW berjiwa keras dan berhati kasar, tentu orang-orang akan menjauhinya. Dalam konteks manajemen pelayanan ayat tersebut mengandung beberapa pedoman.

Pertama karakter lemah lembut harus ada disetiap orang yang terlibat dalam interaksi dengan orang lain. Dalam hal ini hubungan antara konsultan pendamping dengan para pelaku UMKM yang melakukan konsultasi harus dilandasi dengan sikap lemah lembut. Ketika konsultan

pendamping memberikan arahan atau pengertian dan juga penjelasan kepada para pelaku UMKM dengan lemah lembut maka akan lebih mudah dipahami dan mendapat kesan yang baik pula bagi para pelaku UMKM yang melakukan konsultasi. Kemudian disamping sifat lemah lembut yang harus tampak dalam hubungan sosial juga harus tertanam dalam hati. Agar dapat melahirkan perasaan saling memaafkan dan ampunan diantara mereka ketika terdapat benturan antara konsultan pendamping dengan pelaku usaha.

Pelayanan prima seharusnya diterapkan secara konsisten. Apabila pelayanan dilakukan dengan kurang sopan atau tidak baik maka akan memberikan kesan yang tidak sehat. Dalam hadits riwayat Abu Dawud dijelaskan bahwa: “bekerjalah semaksimal yang kamu bias lakukan, karena sesungguhnya Allah tidak pernah bosan sampai kalian bosan sendiri. Hanya saja, amal perbuatan yang paling dicintai oleh Allah adalah sedikit namun kontinyu”.

Nilai kontinuitas akan melahirkan kesan yang baik. Apabila pelayanan prima dilakukan setiap waktu maka citra atau kesan baik juga akan didapatkan. Pada akhirnya apabila pelayanan yang diberikan oleh PLUT KUMKM Jawa Tengah itu prima maka para pelaku usaha yang berkonsultasi akan merasa nyaman.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan menggunakan metode kualitatif dan digolongkan sebagai penelitian deskriptif. Berdasarkan fakta-fakta yang tampak terlihat di lapangan, (Karuniati and Sugianingrat, 2021) menurut Hadari Nawawi (2005:63) menyatakan bahwa teknik deskriptif menjadi gambaran objek penelitian pada saat sekarang. Berdasar pada positivisme sebagai kerangka teoritis untuk menyelidiki objek-objek alamiah. Pendekatan secara langsung diambil untuk pengumpulan data, menggunakan analisis data induktif, dan temuan penelitian dengan memprioritaskan signifikansi daripada generalisasi. (Sugiyono, 2008).

Peneliti dalam penelitian ini ingin menganalisis mengenai Efektivitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Kabupaten Banyumas dalam memperoleh Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) melalui digital online single submission (OSS). Selain itu, peneliti tertarik pada data yang komprehensif dan luas mengenai hasil penelitian. Hal ini sejalan dengan metode penelitian kualitatif, di mana peneliti memilih teknik deskriptif bersama dengan pendekatan kualitatif sebagai metodologi penelitian ini.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PLUT KUMKM JATENG Kab. Banyumas dan di kediaman Pelaku UMKM sektor makanan dan minuman di Kabupaten Banyumas.

C. Objek dan Subjek Penelitian

Objek Penelitian adalah dengan menggunakan varian spesifik pada individu, benda, atau kegiatan untuk meneliti dan mengembangkan

kesimpulan mengenai atribut, sifat, atau nilai mereka (Sugiyono, 2008). Objek penelitian ini adalah sistem digital Online Single Submission (OSS).

Suharsimi Arikunto mendefinisikan subjek penelitian sebagai segala sesuatu yang berbentuk benda, hal, atau orang yang merupakan tempat data, tempat variabel penelitian melekat, dan yang dipermasalahkan dalam suatu penelitian (Rahmadi, 2011). Subjek penelitian ini adalah pelaku UMKM di Kab. Banyumas.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Primer

Menurut Noegroho Boedijoewono (2016), informasi yang secara langsung di kumpulkan oleh orang disebut data primer. Dan pelaku UMKM menjadi sumber data utama penelitian ini.

2. Sekunder

Noegroho Boedijoewono (2016) mendefinisikan data sekunder sebagai informasi yang dikumpulkan oleh pihak ketiga. Dokumen-dokumen yang terkait seperti dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Banyumas dan situs web resmi Dinas UMKM dan koperasi, menjadi data sekunder untuk penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Menjadi cara yang paling strategis dalam sebuah penelitian menggunakan teknik pengumpulan data karena mengumpulkan data adalah tujuan utama dari sebuah penelitian. Data yang tidak sesuai dengan standar data yang dibutuhkan tidak akan didapatkan oleh peneliti apabila tidak mengetahui teknik pengumpulan data (Sugiyono, 2016:224). Dalam penelitian ini, observasi, wawancara, dan dokumentasi digunakan sebagai metode yang untuk mengumpulkan data.

1. Observasi

Menurut Sugiyono (2018:229) Observasi merupakan metode pendekatan dengan mengumpulkan data yang jika di bandingkan dengan

teknik lain akan sangat berbeda karena observasi memiliki ciri spesifik sendiri. Batasan untuk individu jelas tidak ada pada cara observasi ini, karena banyak objek yang bisa diteliti. Peneliti dapat memperoleh pemahaman tentang perilaku dan maknanya dengan melakukan observasi. Dalam penelitian sistem digital ini, observasi langsung ke lapangan digunakan untuk mengetahui kondisi sebenarnya pelaku usaha mikro di Kabupaten Banyumas.

Menurut Yusuf (2013:384) Efektivitas observasi sebagai strategi pengumpulan data sebagian besar tergantung pada peneliti, yang mengamati dan mengobservasi objek penelitian sebelum menarik kesimpulan dari apa yang mereka lihat dan dengar. Mengajukan pertanyaan dan memeriksa hubungan antara berbagai aspek dari topik yang diteliti memungkinkan peneliti untuk menginterpretasikan apa yang dilihatnya dengan kredibilitas dan dalam latar yang alami..

2. Wawancara

Wawancara adalah interaksi antar manusia berupa pertanyaan dan jawaban yang dilakukan secara langsung, fungsi dari wawancara untuk mengidentifikasi masalah yang memerlukan penyelidikan lebih lanjut. Dengan sedikitnya informasi yang didapat oleh peneliti maka untuk mendukung serta melengkapi data penelitian wawancara ini akan sangat dibutuhkan (Sugiyono, 2008). Peneliti menggunakan pendekatan wawancara terstruktur dimana peneliti memberikan pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh responden. Peneliti mewawancarai informan atau pelaku UMKM industri makanan dan minuman di Kabupaten Banyumas, guna mendapatkan informasi mengenai efektivitas sistem penerbitan SPP-IRT secara digital atau online ini.

3. Dokumentasi

Catatan kejadian yang telah berlalu disebut dokumen. Contohnya tulisan, foto, bahkan karya-karya besar seseorang. Penelitian akan lebih percaya dengan adanya bukti dokumentasi ketika observasi atau wawancara dilakukan (Sugiyono, 2016: 240). Foto-foto yang berkaitan

dengan penelitian ke efektivan sistem OSS ini akan lebih memperkuat dan mendukung data.

F. Uji Keabsahan Data

Pentingnya memastikan data yang dihasilkan dalam penelitian dapat dijelaskan secara ilmiah, maka pengujian keabsahan data sangatlah penting. Memverifikasi keaslian data adalah langkah penting dalam mengurangi kesalahan selama proses pengumpulan data, yang tentunya akan berdampak pada temuan penelitian. Ketika status sebenarnya dari objek penelitian dan laporan dari peneliti sama, maka data dalam penelitian kualitatif dapat dianggap sah. Peneliti menggunakan metode berikut untuk memastikan keabsahan data:

1. Perluasan pengamatan, ketika melakukan penelitian, peneliti kembali ke lapangan untuk mengulangi temuan mereka berbicara dengan subjek yang sama atau berbeda. Peneliti memastikan kembali apakah data yang diamati sudah sesuai atau tidak dengan pengecekan ulang ini.
2. Meningkatkan ketekunan akan melibatkan pengamatan secara lebih komprehensif dan berkaitan. Menggunakan cara demikian akan meningkatnya kepastian data dan urutan kronologis peristiwa yang kemudian didokumentasikan dengan jelas.
3. Triangulasi

Dalam uji kredibilitas ini, triangulasi mengacu pada proses verifikasi informasi dari beberapa sumber pada waktu yang berbeda dan dengan cara yang berbeda.

a. Triangulasi Sumber

Dengan melakukan referensi silang terhadap data yang diperoleh dari berbagai sumber, triangulasi sumber digunakan untuk menilai keandalan informasi. Misalnya, untuk memverifikasi kebenaran informasi mengenai gaya kepemimpinan seseorang, data dikumpulkan dan dievaluasi relatif terhadap tiga kelompok orang: bawahan yang dipimpin, atasan yang memberikan tugas, dan rekan kerja yang bekerja

sama. Alih-alih dirata-ratakan, seperti dalam penelitian kuantitatif, data dari ketiga sumber tersebut dapat dicirikan, dikategorikan, dan ditunjukkan sudut pandang masing-masing sumber data. Kemudian meminta kesepakatan (member check) dengan ketiga sumber data tersebut mengenai data yang dievaluasi untuk mendapatkan suatu hasil. Dalam hal ini, triangulasi sumber melibatkan penggunaan metodologi yang sama untuk memperoleh data.

b. Triangulasi teknik

Strategi triangulasi ini menggunakan metode yang berbeda untuk mengumpulkan informasi dari satu sumber. Para peneliti secara bersamaan menggunakan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama. Data diperiksa terhadap sumber yang sama dengan menggunakan berbagai cara sebagai bagian dari proses triangulasi untuk menentukan keandalan data. Survei, observasi, dan pencatatan, digunakan untuk mengonfirmasi informasi yang diperoleh dari wawancara. Ketika mengevaluasi terdapat data yang tidak konsisten atau tidak memiliki kejelasan maka peneliti akan memilih dan menentukan ke akuratan data lagi.

c. Triangulasi Waktu

Beberapa hal terkait waktu bisa memengaruhi keandalan data. Pagi hari mungkin dapat menjadi opsi bagi peneliti untuk memperoleh informasi dengan wawancara. Dengan demikian menambahkan statistik yang lebih andal untuk membuatnya tampak lebih kredibel juga akan mudah di dapatkan karna memahami kondisi situasi waktu sampai memperoleh kepastian data.

G. Teknik Analisis Data

Proses pengumpulan dan pengorganisasian data yang terarah dan tidak jauh dari catatan kondisi secara langsung dengan berdialog tanya jawab, dan terdapat bukti konkrit dikenal sebagai analisis data. Hal ini melibatkan kategorisasi, segmentasi, berkembang, dan penyusunan data yang terstruktur,

memilih data yang tepat signifikan dan diinvestigasi lebih lanjut untuk menarik kesimpulan yang mudah dipahami oleh individu dan publik (Sugiyono, 2016: 244). Analisis deskriptif digunakan dalam analisis data penelitian ini.



BAB IV

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Umum UMKM Di Banyumas

1. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Berikut ini adalah definisi UMKM menurut UU No. 20/2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah:

- a. Individu atau badan hukum independen yang menjalankan bisnis yang menguntungkan dikenal sebagai usaha mikro.. Mereka harus memiliki hasil penjualan tahunan tidak lebih dari Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) atau memiliki kekayaan bersih tidak lebih dari Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan yang digunakan untuk tempat usaha. Usaha mikro-yang biasanya dijalankan oleh individu atau keluarga-merupakan bagian terbesar dari UMKM di Banyumas. Warung makan, supermarket, dan toko-toko pengrajin adalah beberapa contohnya.
- b. Usaha kecil adalah usaha mandiri dan menguntungkan yang dijalankan oleh seseorang atau organisasi yang bukan merupakan cabang atau anak perusahaan dari perusahaan yang dimiliki, dikendalikan, atau terlibat dalam beberapa cara dalam usaha menengah atau besar. Pendapatan tahunan usaha kecil harus melebihi Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) atau memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Di Banyumas, usaha kecil terdiri dari pengolahan makanan, manufaktur kecil, dan penyedia jasa yang lebih formal.
- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang berdiri sendiri. Usaha ini dapat dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar

yang memiliki memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah), atau memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.. Kedua jenis usaha tersebut dapat berupa entitas ekonomi yang produktif dan berdiri sendiri. Dibandingkan dengan usaha mikro dan kecil, usaha menengah biasanya memiliki struktur manajemen yang lebih rumit dan jumlah karyawan yang lebih banyak. (Mukti, 2016).

2. Peran dan Kontribusi UMKM

UMKM merupakan bagian penting untuk peningkatan perekonomian Kabupaten Banyumas yang memiliki pengaruh terhadap keadilan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan pengembangan lapangan kerja. UMKM tersebar luas di berbagai bidang usaha di Banyumas, seperti jasa, perdagangan, pertanian, dan sektor kreatif.

3. Strategi Pengembangan UMKM

Dalam rangka mencapai misinya untuk mengangkat ekonomi kreatif, perdagangan, koperasi, dan usaha kecil dan menengah menjadi yang terdepan dalam perekonomian dan menciptakan ekonomi nasional yang berdaya saing dan maju, semua kedinasan di Kabupaten Banyumas menyusun strategi untuk UMKM.

4. Sektor Utama UMKM di Banyumas

a. Pertanian dan Perkebunan

Banyumas terkenal dengan hasil pertaniannya, termasuk sayuran, jagung, dan beras. Proses pengolahan hasil pertanian menjadi barang konsumsi atau bahan baku industri merupakan hal yang umum dilakukan oleh UMKM di industri ini.

b. Kuliner

Kabupaten Banyumas terkenal dengan makanan khasnya, antara lain getuk goreng, soto Sokaraja, dan mendoan. Makanan tradisional ini diolah dan dijual oleh banyak UMKM di industri kuliner.

c. Kerajinan Tangan dan Industri Kreatif

Di Banyumas, kerajinan tangan seperti ukiran kayu, anyaman bambu, dan batik memainkan peran penting dalam UMKM. Baik pasar nasional maupun lokal sering membawa produk-produk ini.

d. Perdagangan dan Jasa

Toko-toko ritel, warung, dan penyedia jasa seperti salon, bengkel, dan layanan kebersihan adalah contoh UMKM di industri ini.

5. Tantangan yang Dihadapi UMKM

a. Akses ke Modal

Hambatan terbesar adalah ketersediaan dana dan pendanaan yang terbatas. Banyak UMKM yang kesulitan mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan yang sudah mapan.

b. Pemasaran dan Distribusi

Hambatan lainnya adalah terbatasnya jaringan pemasaran dan distribusi, terutama ketika mencoba menjangkau pasar yang lebih besar.

c. Literasi Digital

Banyak pelaku UMKM yang masih belum mengetahui cara menggunakan teknologi digital untuk memasarkan dan menjalankan bisnis mereka.

d. Birokrasi dan Regulasi

UMKM sering menghadapi hambatan pengembangan sebagai akibat dari prosedur perizinan dan regulasi yang rumit.

6. Infrastruktur dan Akses Pasar

a. Pasar Tradisional dan Modern

Ada banyak pasar tradisional di Kabupaten Banyumas yang menjadi pusat kegiatan UMKM, selain itu pasar modern dan pusat perbelanjaan yang memberikan ruang bagi produk UMKM.

- b. Akses Transportasi
Infrastruktur transportasi juga sudah membaik, jalan raya dan stasiun kereta api di Purwokerto menjadi peran penting distribusi produk UMKM ke berbagai daerah.
7. Dukungan dan Program Pemerintah
 - a. Pembiayaan dan Kredit
UMKM di bantu oleh pemerintah daerah untuk mendapatkan pembiayaan khusus dari perbankan di Kabupaten Banyumas khususnya Kredit Usaha Rakyat (KUR).
 - b. Pelatihan dan Pengembangan Kapasitas
Adapun Program pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, dinas terkait, dan lembaga swasta bertujuan untuk meningkatkan keterampilan manajemen, produksi, dan pemasaran bagi pelaku UMKM.
 - c. Digitalisasi UMKM
Memberikan program khusus untuk UMKM terkait dengan sistem menggunakan e-commerce.
 - d. Fasilitasi Perizinan
Memberikan fasilitas pelayanan pembuatan SPP-IRT menggunakan basis internet yakni *Online Single Submission* (OSS).
 8. Inovasi dan Pengembangan Produk
 - a. Peningkatan Produk
UMKM di Banyumas meningkat dengan inovatif dalam mengembangkan produk baru, baik dalam bentuk variasi makanan, desain kerajinan, maupun layanan jasa.
 - b. Sertifikasi dan Standardisasi
Dengan menggunakan Sertifikasi terhadap semua produk UMKM yang ada di Kabupaten Banyumas, dapat meningkatkan kualitas produk UMKM itu sendiri.

9. Peran Komunitas dan Asosiasi

a. Koperasi dan Asosiasi UMKM

Bergabungnya pelaku UMKM dengan koperasi dan organisasi tertentu juga membuat UMKM di Kabupaten Banyumas mendapatkan pelatihan pemasaran, pembiayaan dan perizinan.

b. Kolaborasi dan Networking

Kegiatan kerjasama antar UMKM dan lembaga dinas terkait, serta pelatihan market online, menjadi strategi penting untuk meningkatkan daya saing di pasar luar.

B. Gambaran umum SPP-IRT

Salah satu prasyarat bagi para pelaku perusahaan makanan olahan untuk dapat menjual produk mereka ke konsumen adalah mendapatkan izin edar. Otorisasi distribusi ini berlaku untuk barang-barang yang diproduksi secara lokal selain barang-barang yang dibeli dan diperdagangkan secara lokal. Berdasarkan kategori pangan dan tingkat risiko, Bupati/Walikota cq. Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu, khususnya SPP-IRT, yang di terbitkan oleh B-POM.

SPP-IRT merupakan bukti kesungguhan pelaku usaha dalam menjamin gizi, keamanan, dan pelabelan pangan olahan yang dikemas di toko-toko ritel Indonesia untuk diperdagangkan. Izin Edar ini merupakan komitmen formal dari Bupati/Walikota bahwa dengan memenuhi semua persyaratan pemberian SPP-IRT, pangan yang diproduksi oleh IRTP tersebut dapat diedarkan di wilayah kerjanya.

1. Kualifikasi Dasar Izin PIRT

- a. Lokasi bisnis dan tempat tinggal dapat berdampingan.
- b. Makanan olahan yang diproduksi secara manual hingga semi otomatis.
- c. Untuk informasi mengenai jenis-jenis pangan PIRT, lihat lampiran Peraturan Kepala BPOM No. 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT).

2. Jenis Pangan Olahan yang dapat didaftarkan sebagai PIRT
 - a. Produk yang terbuat dari daging kering
 - b. Produk Olahan Ikan, Seperti Ekinodermata, Krustasea, dan Moluska
 - c. Produk Olahan Telur dan Unggas
 - d. Produk Rumput Laut, Sayur, dan Buah yang telah diolah
 - e. Barang Giling dan Barang Hasil Olahan
 - f. Minyak
 - g. Gula, Kembang Gula, Cokelat
 - h. Teh dan Kopi Kering
 - i. Rempah-rempah dan Bumbu
 - j. Minuman Serbuk dan Tanaman Obat;
 - k. Pengolahan Biji-bijian, Kacang-kacangan, dan Umbi-umbian.
(Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (F.L and M, n.d.)).

C. Cara Menggunakan *Sistem Online Single Submission*



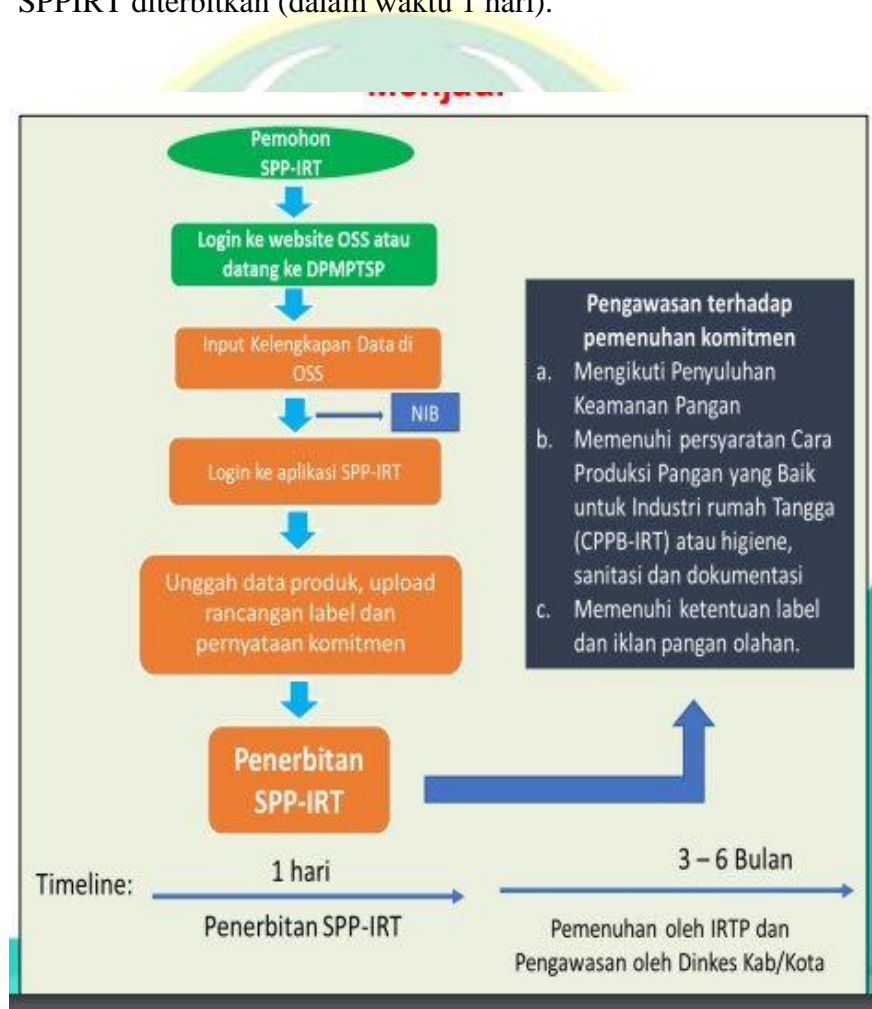
Gambar 4.1 Tampilan utama web OSS
(<https://infiniti.id/blog/legal/sejarah-panjang-oss-di-indonesia>)

Sebuah kemajuan signifikan dalam reformasi birokrasi di Indonesia, sistem *Online Single Submission* (OSS) berusaha untuk mempercepat dan merampingkan prosedur perizinan usaha. Dengan segala kelebihanannya, OSS seharusnya dapat membantu UMKM untuk berkembang dan menarik lebih banyak modal sekaligus mendorong lingkungan yang lebih terbuka dan efektif untuk berbisnis. Penerapan OSS masih menghadapi berbagai kendala, namun perbaikan sistem dan infrastruktur yang berkelanjutan dapat memaksimalkan potensinya bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Pelaku usaha harus memiliki sejumlah prasyarat untuk dapat mengakses Open Source Software (OSS), termasuk kemampuan untuk membuat user ID dan memiliki NIK. NIK Penanggung Jawab Badan Usaha merupakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang wajib dimiliki oleh pelaku usaha, khususnya yang berbentuk badan usaha. Sebelum mendapatkan akses ke OSS, pelaku usaha yang masuk dalam kategori Badan usaha yang berbentuk yayasan, koperasi, CV, firma, dan persekutuan perdata, selain badan usaha berbentuk PT, harus menyelesaikan proses pengesahan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui AHU Online. Selain itu, badan layanan umum, lembaga penyiaran, dan badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara, serta pelaku usaha atau badan usaha yang berbentuk Perum atau Perumda, harus membuat landasan hukum pendirian badan usaha.

1. Alur pendaftaran dan pembuatan SPP-IRT dengan menggunakan *Sistem Online Single Submission* (OSS):
 - a. Pemohon SPP-IRT dapat mengunjungi Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) atau Mal Pelayanan Publik (MPP) yang terdekat dengan lokasi pemohon, atau masuk ke sistem OSS di <https://oss.go.id>.
 - b. Mengisi OSS dengan semua data (untuk mendapatkan NIB)
 - c. Mengumpulkan informasi yang dibutuhkan untuk mengajukan permohonan SPP-IRT UMKU.
 - d. Untuk mengajukan barang baru, klik tautan pemenuhan komitmen di OSS. Ini akan membawa Anda ke halaman <https://sppirt.pom.go.id/> / aplikasi.

- e. Jika dalam aplikasi SPP-IRT sudah terdapat data NIB, maka pemohon tidak perlu masuk ke aplikasi spirt.pom.go.id. Pemohon harus melengkapi data di spirt.pom.go.id apabila data NIB belum pernah terdaftar di aplikasi spirt.pom.go.id.
- f. Pemohon menyerahkan pernyataan komitmen, desain label, dan data produk.
- g. Sistem akan melakukan validasi aplikasi SPRIT secara otomatis, dan secara otomatis akan membuat No P-IRT sesuai dengan data yang dimasukkan oleh pelaku usaha.
- h. SPPIRT diterbitkan (dalam waktu 1 hari).



Gambar 4.2 Tahapan penerbitan SPP-IRT
(<https://encr.pw/A0BZ8>)

Tiga (3) bulan setelah diterbitkannya SPP-IRT, janji pelaku usaha dimonitor pemenuhannya. Batas waktu tiga bulan ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota setempat (Cq. Dinas Kesehatan) untuk melengkapi bagian yang belum dipenuhi.

Jika janji tindak lanjut tidak dilaksanakan dalam waktu tiga bulan, maka Dinas Kesehatan harus memberikan bukti pemenuhan untuk mendapatkan SPP-IRT. Bukti ini dapat dilihat di sini:

1. Terlibat dalam penyuluhan keamanan pangan akan mendapatkan sertifikat penyuluhan keamanan pangan dari dinas kesehatan setempat (diperoleh setelah mengikuti PKP, yang mensyaratkan nilai post-test minimal 60). Gunakan konselor keamanan pangan yang berkualifikasi untuk memberikan panduan tentang keamanan pangan (PKP).
2. Mematuhi Peraturan BPOM Nomor HK.03.1.23.04.12.2206 tahun 2012 tentang CPPB-IRT, atau persyaratan higiene, sanitasi, dan dokumentasi Cara Produksi Pangan yang Baik untuk Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT).
3. Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor: HK.03.1.23.04.12.2207 Tahun 2012, tanggal 5 April 2012, tentang Tata Cara Inspeksi Sarana Produksi PIRT, sarana tersebut telah diinspeksi, dan hasilnya memenuhi level I atau II.
4. Dukungan dalam memenuhi persyaratan Sarana Hasil Inspeksi CAPA.
5. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang pelabelan dan periklanan pangan olahan.

D. Efektivitas Penerbitan SPP-IRT Menggunakan digital *Online Single Submission* (OSS) di Kabupaten Banyumas

Penawaran pada layanan elektronik, DPMPTS juga PLUT KUMKM di Kabupaten Banyumas melayani kebutuhan para pelaku usaha dan masyarakat. Salah satu caranya adalah dengan menerapkan aplikasi *Online Single Submission System* (OSS). Aplikasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memudahkan masyarakat dalam melakukan pelayanan.

Layanan perizinan usaha adalah salah satu layanan yang ditawarkan. UMKM Kabupaten Banyumas menjadi target sasaran dari layanan perizinan usaha tersebut. Hal ini dikarenakan saat ini belum diketahui bagaimana aplikasi tersebut akan memberikan manfaat bagi masyarakat atau pelaku usaha.

Mengikuti ketentuan peraturan yang berlaku sesuai dengan kewenangan yang diperoleh, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terkhusus PLUT KUMKM telah memahami OSS sesuai dengan kewenangan yang dimiliki atau berdasarkan kewenangan yang dimilikinya. Jika kewenangan ditinjau dari perspektif ini, dalam buku Teori-teori Hukum oleh (Atmadja and Budiarta, 2018), dijelaskan bahwa ada tiga cara memperoleh kewenangan atau otoritas, yaitu mandat, delegasi, dan atribusi. Dalam hal legalitas tindakan pemerintah, metode-metode untuk memperoleh kewenangan atau otoritas ini adalah sebagai berikut: Legislator memberikan wewenang kepada pejabat dan badan pemerintah. Delegasi adalah pelimpahan wewenang kepada organ, badan, atau pejabat pemerintah lain dengan pertanggungjawaban dan kewajiban penuh kepada penerima dari organ, badan, atau pejabat yang memiliki wewenang atribusi. Mandat juga dapat dianggap sebagai cara bagi pejabat pemerintah, organ, badan, atau karyawan bawahan untuk mengirimkan wewenang kepada anggota staf tingkat yang lebih rendah yang bekerja atas namanya. Hal ini dikenal sebagai mandat. (Atmadja and Budiarta, 2018)

Kegunaan juga dapat didefinisikan sebagai ukuran seberapa baik "output", kebijakan organisasi, dan proses selaras satu sama lain. Ini adalah hubungan antara "keluaran" dan tujuan. Kegunaan juga terkait dengan seberapa efektif suatu prosedur dalam domain publik; oleh karena itu, suatu kegiatan dapat dianggap berhasil jika kegiatan tersebut secara signifikan memajukan tujuan untuk meningkatkan keahlian dalam memberikan layanan kepada warga. Efisiensi suatu rencana terutama ditentukan oleh seberapa baik tujuan program yang direncanakan dilaksanakan, sebagaimana ditunjukkan oleh berbagai indikator atau kriteria efektivitas. Ketika sebuah program mencapai tujuannya, "keluaran" program tersebut memiliki berbagai

konsekuensi dan hasil yang digambarkan oleh indikator-indikator efektivitas. "Keluaran" yang dihasilkan tetap memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dan membuat proses kerja suatu unit organisasi tetap berjalan secara efisien. Membandingkan hasil aktual yang dicapai dengan hasil yang direncanakan adalah cara lain untuk mengukur tingkat kegunaan. Sebaliknya, hal-hal yang tidak efisien adalah hal-hal di mana tujuan atau target yang diharapkan tidak tercapai sebagai akibat dari pekerjaan yang tidak tepat atau hasil dari tindakan yang tidak sesuai.

Menurut temuan awal, sejumlah pelaku UMKM masih menggunakan program OSS tanpa izin usaha yang diperlukan. Sebagai hasilnya, Sutrisno (2007) mengidentifikasi lima indikator ukuran keberhasilan-pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, mencapai tujuan, dan perubahan yang nyata-yang dapat digunakan untuk menetapkan dan mengevaluasi efektivitas aplikasi (Alimuddin et al., 2023). Mengingat teori ini dapat menunjukkan hasil dari sebuah program yang ditawarkan kepada masyarakat, maka mengevaluasi efektivitas program dalam organisasi atau lembaga yang bertanggung jawab atas program tersebut sangatlah penting. Penulis menggunakan identifikasi SWOT, yang merupakan singkatan dari Strengths, Weaknesses, Opportunities, dan Threats, selain teori ukuran efektivitas, untuk menilai efektivitas penerapan sistem OSS dalam perizinan usaha SPPIRT di Kabupaten Banyumas.

Efektivitas penerbitan SPPIRT dengan menggunakan Sistem *Online Single Submission* (OSS) bagi pelaku UMKM di Kabupaten Banyumas pada tahun 2024 diuraikan dalam laporan penelitian penulis berikut ini.

1. Deskripsi Narasumber

Informasi yang dikumpulkan dari para responden dapat digunakan untuk mengklasifikasikan data yang berkaitan dengan kelompok usia, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan yang diwawancarai di lapangan, untuk memudahkan pembagian berdasarkan objek penelitian.

Setelah itu, ciri-ciri dan tanggapan dari para narasumber yang telah memberikan informasi dan data untuk penelitian ini disusun secara metodis :

a. Informasi Narasumber berdasarkan gender

Terdapat dua kategori yakni laki-laki (L) dan perempuan (P) untuk mengklasifikasikan narasumber. Persentase untuk setiap kategori ditunjukkan pada Tabel 4.1 di bawah ini:

Tabel 4.1
Narasumber Berdasarkan gender

No.	Gender	Jumlah	Persentase
1	L	10	50%
2	P	10	50%
	Total seluruh	20	100%

Tabel 4.1 di atas menggambarkan bahwa, dengan persentase 50% untuk laki-laki dan 50% untuk perempuan, narasumber memiliki rasio frekuensi yang sama.

b. Informasi Narasumber berdasarkan Umur

Distribusi usia informan dibagi menjadi tiga kelompok usia: 20-30 tahun, 31-40 tahun, dan 41-50 tahun. Frekuensi dan proporsi masing-masing kelompok usia dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 4.2
Narasumber Berdasarkan Usia

No.	Usia	Jumlah	Presentase
1	20-30	10	50%
2	31-40	5	25%
3	41-50	5	25%
	Total seluruh	20	100%

Tabel 4.2 di atas menggambarkan sebagian besar narasumber ber usia antara 20 hingga 30 tahun (sepuluh orang, atau 50%), 31 hingga 40 tahun (lima orang atau 25%), dan 41 hingga 50 tahun (lima orang atau 25%).

c. Informasi Narasumber berdasarkan Pendidikan

Berdasarkan latar belakang pendidikan mereka, wawancara dibagi menjadi tiga kategori, SMP/Mts, SMA/MA, D3/S1/S2. Frekuensi masing-masing akan dijelaskan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4.3
Keadaan Narasumber berdasarkan Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah	Presentase
1	SMP/Mts	5	25%
2	SMA/MA	10	50%
3	D3/S1/S2	5	25%
	Total seluruh	20	100%

Tabel 4.3 menggambarkan bagaimana perbandingan informan dengan siswa SMP/MTs (lima orang, atau 25% dari total), SMA/MA (sepuluh orang, atau 50% dari total), dan D3/S1/S2 (lima orang, atau 25% dari total)

2. Interpretasi Data

Informasi yang diperoleh dari narasumber sebagai hasil wawancara berikut :

Tabel 4.4
Narasumber dari PLUT KUMKM dan Pelaku UMKM

No.	Nama	Lembaga	Alamat	Jabatan
1	Rahayu Budi Arthani, S.Pd	PLUT KUMKM	Cluster Diamond Regency No. 2, Sokaraja Wetan, Sokaraja, Banyumas	Staf Teknologi dan Informasi
2	Yanuar Diah Laveti, S.Pd	PLUT KUMKM	Perum Adhyaksa Residence Blok N5 aranggintung, Kec. Sumbang, Banyumas	Staf SDM
3	Agus Rahmat Widodo, S.E	PLUT KUMKM	Jl. Pinus 3 No. 42 Perum Bumi Tanjung Elok, Kel. Purwokerto Selatan	Staf Jaringan Kerjasama

4	Rina Yulianti, S.H	PLUT KUMKM	Jl. Susukan Gg Kemuning II Rt 9 Rw 2 Bobosan , Purwoketo Utara, Banyumas	Staf Kelembagaan
5	Agus Mustofa, S.E., MM	PLUT KUMKM	Desa Surotrunan Rt 2 Rw 2, Kec. Alian, Kebumen	Staf Pembiayaan
6	Anggit Trianto	SAVANA GULA	Bancarkembar Rt 05 rw 07, purwokerto utara	Owner/Pelaku Usaha
7	Wahyu Nugroho	WAH Snack	Bancarkembar Rt 05 rw 07, Purwokerto Utara	Owner/Pelaku Usaha
8	Bayu Setiawan	Rames dua Sodara	Bancarkembar Rt 04 Rw 07, Purwokerto Utara	Owner/Pelaku Usaha
9	Rosiatun Nisa	Keripik khas Banyumas	Desa Pageraji, Kecamatan Cilongok	Owner/Pelaku Usaha
10	Desti Triarti	Desti Snak	Desa Pernasidi, Rt 03 Rw 02, Kecamatan Cilongok	Owner/Pelaku Usaha
11	Riny Nur Aeni	Seblak Bu Rini	Desa Besuki, Kecamatan Lumbir	Owner/Pelaku Usaha
12	Dewi Ariyani	Zizi snak	Desa Panembangan, Kecamatan Cilongok	Owner/Pelaku Usaha
13	Andri pambudi	Risky Berkah Mie & Pangsit	Desa Glempang, Kecamatan Cilongok Rt 08 Rw 03	Owner/Pelaku Usaha
14	Dikin	Barokah Chicken	Desa Karang Gandul, Kecamata Karang lewas	Owner/Pelaku Usaha
15	Muhammad Ajib	Batagor Kuah Grendeng	Grendeng, Purwokerto Utara	Owner/Pelaku Usaha
16	Putri Rahayu	Bundane Snak	Pasar Cermat Purwosari, Purwokerto Utara	Owner/Pelaku Usaha
17	Soemarno	Sambel Udang	MangunJaya , Purwokerto Timur	Owner/Pelaku Usaha

		Cobek		
18	Sulistyanto	Griya Madu Toyamili	Desa Dawuhan, Kecamatan Kedung Banteng	Owner/Pelaku Usaha
19	Aprilistiani	Bebek Ungkep Real	Desa Sumbang, Kecamatan Baturaden	Owner/Pelaku Usaha
20	Eni Purnamawati	Kering Kentang Bariklana	Desa Karangsalam, Kecamatan Kedung Banteng	Owner/Pelaku Usaha

3. Deskripsi Hasil Wawancara sesuai Kategorisasi

Penelitian ini dilakukan di rumah masing-masing pelaku UMKM serta Kantor PLUT KUMKM JATENG di Desa Dukuhwaluh, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas. Peneliti menggunakan metode observasi, dokumentasi, dan wawancara untuk mengetahui efektivitas penerbitan SPPIRT bagi pelaku UMKM melalui penggunaan sistem Online Single Submission (OSS). Data dapat ditelaah satu per satu mengenai tanggapan yang diberikan oleh narasumber atau responden berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di lapangan. Hal ini akan memungkinkan untuk menyusun data sebagai berikut:

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Minggu, 25 Maret 2024 pukul 10.00 WIB dengan Ibu Rahayu Budi Arthani, S.Pd., Staf Teknologi dan Informasi, mengenai pengetahuan pegawai mengenai *Sistem Online Single Submission* (OSS) di PLUT KUMKM, pegawai yang bersangkutan telah memahami metodis penggunaan sistem OSS karena nantinya akan berinteraksi dan memberikan pengarahan kepada para pelaku usaha di Kabupaten Banyumas mengenai cara penggunaannya. Melalui sosialisasi, PLUT KUMKM memberikan arahan kepada para pelaku usaha di Kabupaten Banyumas agar dapat saling memahami.

“Kami ditugaskan dari dinas UMKM untuk mensosialisasikan dan memberikan pemahaman digitalisasi penerbitan SPPIRT ini dengan menggunakan OSS, yang paling penting kami pelajari bersama dengan semua staf bagaimana cara OSS ini berjalan”

Selain itu, dalam wawancara yang dilakukan pada hari Minggu, 25 Maret 2024 pukul 10.30 WIB dengan Bapak Agus Rahmat Widodo, S.E., Staf Jaringan Kerjasama, beliau menyatakan bahwa PLUT KUMKM membantu para pelaku usaha di Kabupaten Banyumas untuk mendapatkan pemahaman melalui sosialisasi. Tujuan dari program kecamatan ini adalah memotivasi masyarakat untuk menggunakan media berlisensi online yang telah di sosialisasikan oleh PLUT KUMKM dengan menawarkan fasilitas layanan dukungan bagi perusahaan yang menggunakan sistem OSS. Program ini diselenggarakan pada hari Senin sampai dengan Jumat, dengan program khusus pada hari Sabtu dan Minggu yang dimulai pada pukul 09.00 WIB dan berlangsung hingga selesai..

“Kami ada program tersendiri untuk mensosialisasikan dan mendampingi para pelaku usaha untuk bisa menggunakan OSS sebagai aplikasi yang mempermudah proses pembuatan perizinan berusaha. Setiap hari kami siap melayani mereka, karna itu tugas kami sebagai konsultan. Bahkan Sabtu Minggu masih ada program untuk pelaku usaha. Semua kami berusaha memfasilitasi”.

Selanjutnya, pada wawancara dengan Bapak Agus Mustofa, S.E., M.M., staf pembiayaan PLUT KUMKM, pada hari Minggu, 25 Maret 2024 pukul 11.00 WIB, beliau menyatakan bahwa bimbingan teknis dan pelatihan berbasis pusat terkait penerapan sistem OSS di Kabupaten Banyumas dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada para pegawai di lingkungan PLUT KUMKM.

“Jadi, karena sistem ini juga disediakan oleh pusat, para karyawan menerima arahan dari pusat terlebih dahulu. Kami kemudian memanfaatkan program kami untuk memperkenalkan OSS sebagai tanggapan atas arahan tersebut. Karena ketidaktahuan pelaku usaha, sosialisasi ini belum sepenuhnya berhasil. Akibatnya, jumlah pelaku usaha yang berkunjung ke PLUT menjadi lebih sedikit”.

Selain itu, dalam sebuah percakapan dengan Ibu Yanuar Diah Laveti, S.Pd., M.Si., staf SDM PLUT KUMKM, beliau menyatakan

bahwa kurangnya tenaga kerja bantu menyebabkan masalah dalam mensosialisasikan Program OSS.

“Jujur mas, saya sendiri sebenarnya masih kesulitan untuk mensosialisasikan ke setiap daerah kecamatan di Kabupaten Banyumas ini. Jadi untuk sementara waktu kita lebih sering mengadakan di PLUT sendiri”.

Selain itu, dalam wawancara yang dilakukan pada hari Minggu, 25 Maret 2024 pukul 10.30 WIB dengan Ibu Rina Yulianti, S.H., Staf Kelembagaan, beliau menyatakan bahwa PLUT KUMKM dipersiapkan untuk menjadi konsultan bagi para pelaku usaha, khususnya di wilayah Kabupaten Banyumas.

“Kami memang bertugas untuk menjadi konsultan UMKM, baik dari segi perizinan, marketing, maupun pembiayaan. Jadi kami pasti siap membantu pelaku UMKM supaya bisa tercapai tujuannya terutama di bagian perizinan penerbitan SPPIRT. Seharusnya sistem OSS ini bisa sangat membantu, nanti kami lihat perkembangan UMKM di Banyumas”.

Selain itu, sebagai target dari sistem OSS, Mas Anggit Trianto, seorang pemilik usaha di Kabupaten Banyumas, menyatakan dalam sebuah wawancara bahwa OSS dapat membantunya dalam menangani penerbitan izin usahanya. Baginya, kecepatan dan kemudahan pemrosesan merupakan komponen penting dari implementasi OSS. Ia tidak lagi diharuskan mengunjungi kantor-kantor terkait untuk menyelesaikan proses perizinan. Ia tidak perlu lagi mengunjungi kantor-kantor yang berwenang karena ia dapat mencetak izin SPPIRT sendiri dengan menggunakan satu sistem.

“Kalau saya sendiri Alhamdulillah sangat terbantu dengan sistem ini mas. Minggu lalu saya ikuti sosialisasi dari PLUT dan ternyata sangat membantu sekali. Saya bisa sekaligus 3 produk dalam satu minggu mengurus SPPIRT di rumah dengan OSS ini di web”.

Mengikuti alur sosialisasi, Mas Wahyu Nugroho, seorang pelaku usaha di Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, menyatakan dalam sebuah wawancara bahwa ia dapat dengan mudah mendapatkan izin

usaha perorangan tanpa harus mengunjungi kantor terkait. Selain itu, situs web tersebut juga memuat dengan jelas semua persyaratan yang dibutuhkan untuk mengajukan izin usaha.

“saya juga sama mas kaya anggit, karna saya kan masih tetangga sama anggit. Jadi lebih mudah setelah mengikuti sosialisasi bersama di PLUT, alhasil saya bareng sama anggit dan bayu menyelesaikan semua kepengurusan di rumah, sudah sangat jelas juga sosialisasi minggu lalu tentang web OSS”.

Setelah mengikuti sosialisasi yang ditawarkan oleh PLUT KUMKM, Mas Bayu Setiawan, seorang pelaku usaha di Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, menyatakan dalam sebuah wawancara bahwa penerbitan SPPIRT melalui sistem OSS menjadi sangat bermanfaat.

“bagi saya OSS ini sudah sangat meringankan saya untuk membuat perizinan, saya sendiri tidak perlu lagi kesana kemari ke dinas terkait lagi. Ucap banyak terimakasih aja si sama staf PLUT karna sudah mau membantu kami memahami sistem OSS ini”.

Setelah mengikuti sosialisasi yang ditawarkan oleh PLUT KUMKM, Ibu Rosiatun Nisa, seorang pelaku usaha di Kabupaten Banyumas, dalam sebuah wawancara mengatakan bahwa ia masih bingung bagaimana cara menerbitkan SPPIRT dengan menggunakan sistem OSS. Karena mereka belum memahami sistem digital yang ada di web.

“Tidak faham sama sekali saya mas, cara menggunakan web nya soalnya saya sendiri tidak begitu sering menggunakan hp mas”.

Kemudian wawancara dengan Ibu Desti Triarti selaku pelaku usaha di Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, beliau mengatakan bahwa sistem OSS ini sangat membantu UMKM yang bisa menggunakan internet saja.

“Sistem OSS ini memang sangat membantu pelaku usaha, tapi untuk orang yang sudah umur segini tidak begitu semangat menggunakan

internet mas. Kalau saya sendiri masih mending datang langsung ke kantor dinas UMKM”.

Kemudian wawancara dengan Ibu Riny Nur Aeni selaku pelaku usaha di Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas, beliau mengatakan masih bingung dengan sistem OSS ini.

“Saya masih bingung dan ngga bisa ngikutin alur sosialisasinya mas. Sistem ini paling nanti biar anak saya yang bantu ngurusin pakai OSS”.

Kemudian, dalam sebuah wawancara, Ibu Dewi Ariyani, seorang pemilik perusahaan di Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, mengatakan bahwa ia masih cukup awam dengan sistem digitalisasi yang baru ini.

“Sangat awam mas dengan usia saya masih mengandalkan registrasi atau pembuatan SPPIRT secara manual”.

Kemudian wawancara dengan Bapak Andri pambudi selaku pelaku usaha di Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, beliau mengatakan bahwa sistem OSS ini sangat membantu UMKM terutama beliau sendiri.

“Saya ini kan rumahnya jauh dari kota mas, jadi sangat terbantu dengan sistem OSS ini setelah mengikuti progam dari PLUT”.

Kemudian wawancara dengan Bapak Dikin selaku pelaku usaha di Kecamatan Karang Lewas, Kabupaten Banyumas, beliau mengatakan bahwa sistem OSS kurang begitu difahaminya karena malas untuk menggunakan web di hp.

“HP saya tidak support mas untuk menggunakan web seperti itu, dan saya juga terlalu malas kalo dengan yang berhubungan pendaftaran di internet”.

Kemudian wawancara dengan Muhammad Ajib selaku pelaku usaha di Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, beliau

mangatakan bahwa dengan adanya sosialisasi dari PLUT merasa sangat terbantu untuk mengeluarkan SPPIRT dengan cepat.

“Dengan adanya sosialisasi OSS progam dari PLUT saya sendiri merasa sangat terbantu untuk proses penerbitan SPPIRT ini”.

Kemudian wawancara dengan Ibu Putri Rahayu selaku pelaku usaha di Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, beliau mangatakan bahwa sistem OSS ini sangat membantu bagi generasi pelaku usaha yang masih muda.

“Setelah mengikuti sosialisasi dari PLUT, menurut saya sistem penerbitan dengan menggunakan OSS ini sangat membantu kalangan pelau usaha yang masih muda, karena anak muda pasti jauh lebih cepat memahami sistem OSS ini. Kalau untuk saya pribadi mas, saya masih kurang update dengan web web registrasi seperti ini. Jadi masih mending minta bantuan ke PLUT aja manual”.

Kemudian wawancara dengan Soemarno selaku pelaku usaha di Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, beliau mangatakan bahwa sistem penerbitan SPPIRT menggunakan OSS masih belum cukup di pahami.

“Saya masih belum mengerti mas, karna mudah lupa kalo menggunakan sistem internet seperti ini”.

Kemudian wawancara dengan Sulistyato selaku pelaku usaha di Kecamatan Kedung Banteng, Kabupaten Banyumas, beliau mangatakan bahwa sistem OSS ini masih sulit untuk di gunakan, di akibatkan dengan permasalahan jaringan server.

“Sistem OSS ini sebenarnya sangat membantu mas, namun dengan kesibukan saya masih kesulitan menahan kesabaran untuk mengakses web OSS ini. Jadi ya sudahlah biar anak saya saja yang mengurusnya ke PLUT”.

Kemudian wawancara dengan Aprilistiani selaku pelaku usaha di Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas, beliau mengatakan bahwa menggunakan web OSS tidak semudah saat sosialisasi.

“Tidak semudah ini mas bagi saya untuk mengurus penerbitan SPPIRT menggunakan sistem OSS ini, saya ibu rumah tangga sekaligus usaha sendiri. Masih bingung dengan alur penerbitan SPPIRT di OSS ini.”

Kemudian wawancara dengan Eni Purnamawati selaku pelaku usaha di Kecamatan Kedung Banteng, Kabupaten Banyumas, beliau mengatakan bahwa sistem OSS ini sangat membantu. Karena dengan waktu yang singkat beliau dapat sekaligus membuat SPPIRT untuk 3 produknya.

“Wah sangat terbantu sekali mas dengan adanya sistem OSS ini, dengan sekali registrasi sudah bisa mengurus penerbitan SPPIRT untuk 3 produk saya. Saya sendiri si kurang tau menu dengan sistem ini, namun sistem ini mudah di mengerti sama anak saya. Jadi anak saya yang membantu saya menggunakan sistem OSS ini”.

4. Analisis Hasil Wawancara

Hasil penyajian data akan dikaji dalam subbab ini, dengan mengacu pada hasil interpretasi data yang sesuai dengan bidang kajian penelitian. Dari semua informasi yang dikumpulkan selama penelitian dan hasil wawancara dengan narasumber penelitian mengenai permasalahan yang ingin dibahas, khususnya mengenai efektivitas penerbitan SPPIRT bagi pelaku UMKM di Kabupaten Banyumas dengan menggunakan sistem digital *Online Single Submission* (OSS). Atas dasar hal tersebut, penulis melakukan analisis dengan menggunakan informasi dari hasil wawancara.

Beberapa kriteria untuk menilai tingkat efektivitas kegiatan. Efektivitas, menurut (Irfandi et al., 2023), dapat dinilai dengan menggunakan beberapa cara sebagai berikut:

a. Input

Indikator input dalam penelitian efektivitas mengacu pada faktor yang digunakan untuk mengukur atau menilai sumber daya yang

digunakan dalam suatu program atau kegiatan. Indikator input dapat mencakup hal-hal seperti jumlah tenaga kerja, anggaran, peralatan, dan bahan-bahan yang digunakan dalam suatu program atau kegiatan. Dengan memantau indikator input, peneliti dapat mengevaluasi efisiensi penggunaan sumber daya dan menentukan apakah sumber daya tersebut digunakan secara efektif untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Hasil dari wawancara dengan pelaku UMKM, observasi lapangan, dan analisis dokumen untuk memahami bagaimana sistem OSS tersebut diimplementasikan, pelaku UMKM meresponsnya, dan bagaimana program tersebut mempengaruhi proses penerbitan SPPIRT. Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Mas Anggit Trianto (pelaku UMKM) yang mengatakan,

“Kalau saya sendiri Alhamdulillah sangat terbantu dengan sistem ini mas. Minggu lalu saya ikuti sosialisasi dari PLUT dan ternyata sangat membantu sekali. Saya bisa sekaligus 3 produk dalam satu minggu mengurus SPPIRT di rumah dengan OSS ini di web”,

Hasil dari wawancara dengan pelaku UMKM, observasi lapangan, dan analisis dokumen untuk memahami bagaimana sistem OSS tersebut diimplementasikan, pelaku UMKM meresponsnya, dan bagaimana program tersebut mempengaruhi proses penerbitan SPPIRT sistem OSS ini sudah layak, efisien untuk digunakan oleh pelaku UMKM namun pelaku UMKM masih belum sepenuhnya memahami keunggulan penerbitan SPPIRT menggunakan OSS ini.

b. Proses Produktivitas

Proses ini untuk mengukur, menilai sejauh mana suatu program atau kegiatan telah berhasil dalam mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan. Dengan berdasarkan wawancara Ibu Rosiatun Nisa (pelaku UMKM) beliau mengatakan, “Tidak faham sama sekali saya mas, cara menggunakan web nya soalnya saya sendiri tidak begitu sering menggunakan hp mas”

Berdasarkan pernyataan beliau, maka dapat di simpulkan bahwa pelayanan OSS untuk pelaku UMKM masih kurang efektif di karenakan belum ada rasa ketertarikan dengan program ini.

c. Output (hasil)

Indikator output dapat mencakup hal-hal seperti jumlah produk atau layanan yang dihasilkan, jumlah orang yang terlibat, atau jumlah kegiatan yang dilakukan. Dengan memantau indikator output, peneliti dapat mengevaluasi sejauh mana program atau kegiatan tersebut telah mencapai hasil-hasil yang diharapkan dan sejauh mana program tersebut telah berhasil dalam menghasilkan output yang diinginkan. Namun berdasarkan dari pernyataan Bapak Agus Mustofa, S.E, M.M () mengatakan,

“Jadi, karena sistem ini juga disediakan oleh pusat, para karyawan menerima arahan dari pusat terlebih dahulu. Kami kemudian memanfaatkan program kami untuk memperkenalkan OSS sebagai tanggapan atas arahan tersebut. Karena ketidaktahuan pelaku usaha, sosialisasi ini belum sepenuhnya berhasil. Akibatnya, jumlah pelaku usaha yang berkunjung ke PLUT menjadi lebih sedikit”

Maka peneliti mendapatkan hasil observasi pada pelaku UMKM ternyata program OSS ini belum banyak pelaku UMKM yang menggunakannya meskipun sosialisasi sudah rutin di lakukan.

d. Produktivitas

Indikator produktivitas digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana suatu program atau kegiatan telah berhasil dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan. Dengan memantau indikator produktivitas, peneliti dapat menilai sejauh mana efisiensi dan efektivitas suatu program atau kegiatan dalam menghasilkan produk yang diinginkan. Berdasarkan jawaban dari Ibu Rosiatun Nisa,

“Tidak faham sama sekali saya mas, cara menggunakan web nya dan saya sendiri tidak begitu sering menggunakan hp mas”.

Dari pernyataan beliau dapat di simpulkan bahwa penerbitan SPPIRT pada pelaku usaha menggunakan sistem OSS ini belum maksimal.

Dengan mempertimbangkan hasil yang telah di capai, efektivitas juga dapat di lihat dengan membandingkan prosedur yang sebenarnya. Sebelum dan sesudah adanya penerbitan SPPIRT menggunakan sistem OSS. Berikut hasil berdasarkan wawancara di atas :

a. Keberhasilan/Pemahaman Progam

2 dari 15 pelaku UMKM di Kabupaten Banyumas dan staf Kantor PLUT KUMKM tidak memahami sistem Online Single Submission (OSS).

Mas Anggit Trianto mengatakan,

“Saya sendiri Alhamdulillah sangat terbantu dengan sistem ini mas”

Kemudian Mas Wahyu Nugroho mengatakan,

“Jadi lebih mudah setelah mengikuti sosialisasi bersama di PLUT”

Selanjutnya Mas Bayu Setiawan mengatakan,

“Sudah faham mas, bagi saya OSS ini sudah sangat meringankan saya untuk membuat perizinan”

Lebih lanjut, PLUT KUMKM JATENG di Kabupaten Banyumas menawarkan fasilitas layanan pendampingan berupa program sosialisasi dan konsultasi yang diselenggarakan di tingkat kecamatan untuk mendukung para pelaku usaha yang ingin menggunakan sistem OSS dalam memproses perizinan usaha mereka dengan memberikan arahan, saran, dan bantuan.. Program-program ini diadakan dengan tujuan untuk membantu para pelaku usaha agar dapat lebih memahaminya. Namun, kurangnya pegawai yang membantu sosialisasi dan kurangnya motivasi dari pelaku usaha menyebabkan adanya kendala yang menghambat proses tersebut, yang pada akhirnya menyebabkan penurunan jumlah peserta dan kekurangan pegawai

untuk memberikan Layanan Asistensi OSS kepada pelaku usaha di Kabupaten Banyumas.

Menurut Sutrisno (2007: 125), sejumlah indikator, termasuk "Pemahaman Program", "Tepat Sasaran", "Tepat Waktu", "Pencapaian Tujuan", dan "Perubahan Nyata", harus diperhitungkan dalam menentukan keberhasilan suatu kegiatan. Sejauh mana tujuan program tercapai dalam kaitannya dengan target yang telah ditentukan dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan program. Sementara itu, keberhasilan program dapat dinilai dari sudut pandang masyarakat yang menerima bantuan. Keberhasilan program dapat diukur, misalnya, dengan menilai tingkat kesesuaian program (Alimuddin et al., 2023).

Berdasarkan pada wawancara di atas dengan narasumber terkhusus pada pelaku UMKM di Kabupaten Banyumas masih belum mencapai keberhasilan sepenuhnya dan 12 pelaku UMKM dari 15 UMKM belum memahami cara penerbitan SPPIRT dengan menggunakan sistem digital *Online Single Submission* (OSS) ini. Sebagaimana tujuan dari penelitian ini untuk menentukan efektivitas program ini masih banyak pelaku UMKM yang membutuhkan bantuan secara langsung dengan menggunakan sistem digital *Online Single Submission* (OSS).

b. Keberhasilan/Ketepatan Sasaran

Dapat disimpulkan dari hasil wawancara peneliti yang telah dirinci sebelumnya bahwa terdapat persyaratan tertentu yang terkait dengan penerapan sistem OSS di Kabupaten Banyumas. Hal ini dapat diamati dengan melihat seberapa baik sistem atau program OSS sesuai dengan target audiens yang tercakup dalam undang-undang atau peraturan yang berlaku saat ini. Tujuan utama di balik peluncuran sistem OSS ini adalah untuk menjangkau setiap pelaku usaha. Setiap pelaku usaha, baik perorangan maupun badan usaha (PT, CV, dll.), harus memiliki izin usaha. Mereformasi sistem perizinan akan

mendorong standarisasi, yang akan memfasilitasi, mempercepat, dan meningkatkan integrasi birokrasi perizinan nasional dan daerah.

Penargetan program ini akan menjadi faktor dari keberhasilan sistem OSS pada pelaku UMKM. Sistem OSS ini kurang tepat sasaran karena banyak pelaku usaha yang masih belum sepenuhnya paham bagaimana cara menerbitkan SPPIRT dengan menggunakan OSS ini. Akibatnya, mayoritas pelaku usaha lebih memilih untuk meminta bantuan kepada instansi terkait untuk dapat menggunakan sistem OSS ini.

Efektivitas, menurut Mahmudi (2010:143), adalah keterkaitan antara produksi dengan tujuan atau sasaran yang diperlukan. Suatu proses kegiatan dikatakan efektif jika berhasil mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (Lihardi, 2021).

Penargetan program ini akan menjadi faktor dari keberhasilan sistem OSS pada pelaku UMKM. Sistem OSS ini kurang tepat sasaran karena banyak pelaku usaha yang masih belum sepenuhnya paham bagaimana cara menerbitkan SPPIRT dengan menggunakan OSS ini. Sebagaimana pernyataan dari Ibu Desti Triarti,

“Untuk orang yang sudah umur segini tidak begitu semangat menggunakan internet mas. Kalau saya sendiri masih mending datang langsung ke kantor dinas UMKM”

Berdasar pernyataan beliau pelaku usaha lebih memilih untuk meminta bantuan kepada instansi terkait untuk dapat menggunakan sistem OSS ini.

c. Kepuasan Terhadap Program

Pada program layanan penerbitan SPPIRT menggunakan OSS ini, pelaku UMKM belum cukup puas dengan sistem tersebut. Dari hasil wawancara dengan 15 pelaku UMKM, hanya 3 pelaku UMKM yang merasa puas dengan program ini. Namun bukan berarti 12 pelaku UMKM lain benar benar puas, mereka masih merasa ada kepuasan dengan OSS ini dikarenakan adanya bantuan dari staf PLUT KUMKM

yang bersedia menjadi konsultan UMKM. Dari penilaian semua pelaku UMKM yang menjadi narasumber, mereka juga menilai bahwa sistem OSS ini cukup memudahkan, cepat efisien, fleksible, namun ada beberapa kekurangan yaitu akses yang terkadang masih eror dan sistem informasi yang belum sepenuhnya bisa di pahami. Sebagaimana di katakan oleh Bapak agus Mustofa, S.E, M.M.,

“sistem ini juga disediakan oleh pusat, para karyawan menerima arahan dari pusat terlebih dahulu. Kami kemudian memanfaatkan program kami untuk memperkenalkan OSS sebagai tanggapan atas arahan tersebut. Karena ketidaktahuan pelaku usaha dan akses yang terkadang masih eror, sosialisasi ini belum sepenuhnya berhasil. Akibatnya, jumlah pelaku usaha yang berkunjung ke PLUT menjadi lebih sedikit”

d. Tingkat Input dan Output pada sistem OSS pada pelaku UMKM

Apabila sistem OSS ini di nilai berdasarkan tingkat inputnya maka sudah bisa di pastikan bahwa sistem OSS ini sangat baik untuk di implementasikan pada kepengurusan SPPIRT. Apabila sistem OSS ini dinilai berdasarkan tingkat Output nya maka dapat di simpulkan sistem ini belum cukup baik untuk di hadapkan dengan pelaku UMKM, adapun masalahnya yakni di karenakan belum maksimal dalam sosialisasi pada pelaku UMKM.

e. Pencapaian Tujuan Menyeluruh

Hasil wawancara yang disebutkan di atas menunjukkan bahwa tujuan dari implementasi OSS-yaitu, pemahannya semua staf di dinas terkait tetapi tidak bagi pelaku usaha saat ini-belum sepenuhnya terpenuhi atau dijalankan secara efektif. Jika pelaku usaha terus bergantung pada layanan langsung dari instansi terkait, hal ini dapat menjadi penghalang terbesar untuk meminimalisir tujuan dari penerapan sistem OSS. Hambatan lain yang masih ada adalah sinkronisasi data pusat untuk produk yang telah terdaftar menggunakan OSS.

Sistem OSS bertujuan untuk meningkatkan kemudahan penerbitan SPPIRT, dengan meningkatkan akses infrastruktur, pelayanan perizinan berusaha yang mendasar, dan pelatihan langsung kepada para pelaku usaha di Kabupaten Banyumas untuk membantu terwujudnya perizinan perusahaan yang produktif dan berkelanjutan. Jika berbicara mengenai prosedur pengurusan izin perusahaan yang panjang dan rumit, keberadaan OSS sangat membantu para Staf dan pelaku usaha.

Menurut Mardiasmo (2017:134), efektivitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Suatu organisasi telah beroperasi secara efisien jika tujuannya tercapai (Pratiwi et al., n.d.).

- f. Hasil Efektivitas Penerbitan SPP-IRT dengan menggunakan Sistem Digital *Online Single Submission* (OSS) terhadap UMKM di Kabupaten Banyumas

Efektivitas penerbitan SPP-IRT dengan menggunakan Sistem Digital *Online Single Submission* (OSS) berdasarkan kategorisasi belum sepenuhnya tercapai dan terimplementasi dengan baik, meskipun sebagian dari hasil tersebut sudah tercapai. Masih banyak kendala dari pelaku usaha, sesuai dengan pendapat yang disampaikan di atas dan hasil wawancara yang telah dipaparkan. Ketidakmampuan untuk memahami program OSS merupakan indikasi dari hal ini. Mayoritas pelaku usaha belum mengetahui bagaimana cara menggunakan OSS melalui program-program sosialisasi dan Bimbingan Teknis yang diadakan oleh Dinas yang diadakan di setiap kecamatan. Karena keterbatasan jumlah peserta sosialisasi dan jumlah tenaga kerja dari Dinas UMKM-khususnya di PLUT KUMKM dalam hal menawarkan Layanan Pendampingan OSS kepada pelaku usaha di Kabupaten Banyumas-sosialisasi yang telah dilakukan belum sepenuhnya dimanfaatkan.

Diharapkan dengan adanya metode Digital *Online Single Submission* (OSS) akan mempermudah pelaku usaha dan

mengefisiensikan birokrasi. Sasaran utama penerbitan SPPIRT melalui penggunaan sistem OSS ini adalah setiap pelaku usaha. Karena setiap pelaku usaha wajib memiliki izin usaha, baik yang melakukan usaha sebagai perorangan maupun badan usaha (PT, CV, dll).

Sistem Online Single Submission (OSS) telah diberlakukan oleh pemerintah untuk menggabungkan semua layanan perizinan usaha secara elektronik dalam yurisdiksi Gubernur, Bupati/Walikota, atau Menteri/Pimpinan Lembaga. Kami mendukung keseragaman dalam sistem perizinan untuk memudahkan, mempercepat, dan meningkatkan integrasi birokrasi perizinan pusat dan daerah.

Meskipun tujuan program OSS untuk staf telah dilaksanakan secara efektif, akses pelaku usaha terhadap infrastruktur dan layanan perizinan usaha yang mendasar yang diperlukan untuk memfasilitasi penerbitan izin usaha yang menguntungkan dan tahan lama belum sepenuhnya ditingkatkan.

Ada perubahan penting dalam layanan terkait izin usaha karena kehadiran OSS. Dimulai dengan jumlah pelaku usaha, layanan OSS, memungkinkan pelaku UMKM dapat menggunakan sistem OSS dari tanpa harus datang langsung ke kantor yang bersangkutan, dan merampingkan proses penerbitan. Penerapan sistem OSS ini masih memiliki beberapa tantangan, dari beberapa pelaku UMKM masih banyak yang belum melek digitalisasi. Data belum sinkron antara kantor pusat dan daerah membuat lambat proses penerbitan SPPIRT. Namun, badan tersebut dapat mengurangi hambatan-hambatan ini semaksimal mungkin dengan menawarkan layanan konsultasi atau dukungan sebagai kenyamanan untuk memudahkan pelaku usaha dalam memperoleh izin usaha SPPIRT mereka.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penulis melakukan penelitian berdasarkan temuan wawancara sekaligus menjawab rumusan masalah pada penelitian ini :

1. Cara Menggunakan Sistem Online Single Submission
 - a. Pemohon SPP-IRT dapat mengunjungi Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) atau Mal Pelayanan Publik (MPP) yang terdekat dengan lokasi pemohon, atau masuk ke sistem OSS di <https://oss.go.id>.
 - b. Mengisi OSS dengan semua data (untuk mendapatkan NIB)
 - c. Mengumpulkan informasi yang dibutuhkan untuk mengajukan permohonan SPP-IRT UMKU.
 - d. Untuk mengajukan barang baru, klik tautan pemenuhan komitmen di OSS. Ini akan membawa Anda ke halaman <https://spirt.pom.go.id/> / aplikasi.
 - e. Jika dalam aplikasi SPP-IRT sudah terdapat data NIB, maka pemohon tidak perlu masuk ke aplikasi spirt.pom.go.id. Pemohon harus melengkapi data di spirt.pom.go.id apabila data NIB belum pernah terdaftar di aplikasi spirt.pom.go.id.
 - f. Pemohon menyerahkan pernyataan komitmen, desain label, dan data produk.
 - g. Sistem akan melakukan validasi aplikasi SPRIT secara otomatis, dan secara otomatis akan membuat No P-IRT sesuai dengan data yang dimasukkan oleh pelaku usaha.
 - h. SPPIRT diterbitkan (dalam waktu 1 hari).
2. Efektivitas Penerbitan SPPIRT bagi Pelaku UMKM di Kabupaten Banyumas dengan Menggunakan Sistem Digital *Online Single Submission* (OSS)

Penerbitan SPPIRT dengan menggunakan sistem OSS di Kabupaten Banyumas belum sepenuhnya efektif. Meskipun sistem ini memiliki

potensi untuk mempermudah dan mengefisiensikan proses perizinan usaha, masih banyak kendala yang dihadapi oleh pelaku UMKM, seperti kurangnya pemahaman terhadap sistem OSS, akses terhadap infrastruktur dan layanan yang terbatas, ketidakstabilan sistem OSS, dan kurangnya tenaga pendamping. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan efektivitas sistem OSS, seperti meningkatkan sosialisasi dan edukasi, memperluas akses terhadap infrastruktur dan layanan, meningkatkan stabilitas sistem OSS, dan menambah jumlah tenaga pendamping.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan dari penelitian ini maka diberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat Berdasarkan hasil penelitian ini, diharapkan untuk tetap melaksanakan pekerjaan sesuai dengan yang telah ditentukan, baik dengan adanya program atau layanan sistem digital.
2. Bagi peneliti selanjutnya
 - a. Peneliti selanjutnya dapat dilakukan penelitian yang lebih dalam dan lebih luas terkait permasalahan penerbitan SPP-IRT menggunakan OSS dengan metode analisa yang berbeda.
 - b. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber maupun referensi yang terkait dengan efektivitas pengawasan SDM dalam meningkatkan produksi.
 - c. Penelitian selanjutnya diharapkan ditunjang pula dengan wawancara terhadap sumber yang lebih kompeten dalam kajian efektivitas digital online single submission (OSS) dalam meningkatkan minat kewirausahaan mahasiswa.

DAFTAR PUSTAKA

- BPOM. (2018). *Peraturan BPOM No 22 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Pangan Industri Rumah Tangga* . Jakarta: BPOM.
- BPS. (2020). *Berita Resmi Statistik* .
- Kementerian Koperasi dan UMKM. (2022).
- Manovri Yeni, E. I., & Susanti. (2022). Sosialisasi Keamanan Pangan Untuk UKM Pangan Industri Rumah Tangga Centra Kuliner Di Kabupaten Aceh Besar. *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, I(3), 387-396.
- Persada, K. (2022). Retrieved from Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah.
- Purwanto, E. A. (2007). Mengkaji Potensi Usaha Kecil dan Menengah Untuk Pembuatan Kebijakan Anti Kemiskinan di Indoneisa. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 300.
- Putra, A. H. (2016). Peran UMKM dalam Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Blora. *Jurnal Analisa Sosiologi*, V(2).
- Rais Agil Bahtiar, J. (2020). DAMPAK COVID-19 TERHADAP PERLAMBATAN EKONOMI SEKTOR UMKM. *Bidang Ekonomi Dan Kebijakan Publik Info Singkat* , XII(6).
- RI, P. (2021). *PP RI No 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*. Jakarta: Pemerintah RI.
- RI, U. (2008). *Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM (Usaha Menengah Kecil dan Mikro)* . Jakarta: UU RI.
- Singgih, M. N. (2007). STRATEGI PENGUATAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) SEBAGAI REFLEKSI PEMBELAJARAN KRISIS EKONOMI INDONESIA . *Jurnal Ekonomi MODERNISASI*, 218-227.
- Suci, Y. R. (2017). PERKEMBANGAN UMKM (USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH) DI INDONESIA. 6(1).
- UMKM, K. K. (2015). *Laporan Tahunan*.

- Akni, Y., Soedarto, J.H., n.d. EFEKTIVITAS SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BLORA.
- Alimuddin, U.K., Adnan, A.A., Hamid, H., 2023. Efektivitas Pelaksanaan Program Sustainable Development Goals (SDGs) di Desa Tonrong Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang 11.
- Amalia, T., Nisa, N...S., 2022. lia, T. Dan Nisa, N.S. 2020. Kesesuaian Peresepan Obat Pasien Kronis Bpjs Rawat Jalan Poliklinik Penyakit Dalam Terhadap Formularium Rumah Sakit Dengan Formularium Nasional Di Rumah Sakit X. *Jurnal Infokar* 1, 23–30.
- Ardiati, F., 2018. Evaluasi Pelaksanaan Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) Di Banyuwangi. Universitas Airlangga.
- Atmadja, I.D.G., Budiarta, I.N.P., 2018. Teori-teori hukum / Prof. Dr. I Dewa Gede Atmadja, S.H., M.S., Dr. I Nyoman Putu Budiarta, S.H., M.H. 2018 218, 211–215.
- Dahlan, A., 2019. Pengantar Ekonomi Islam Kajian Teologis, Epistemologis, Dan Empiris Edisi Pertama, 1. preadamedia group.
- Dewi, R.A.K., Asrial, C., Rahayu, W.P., 2020. Implementasi Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga Di Provinsi Gorontalo. *J. Mutu Pangan* 7, 52–58. <https://doi.org/10.29244/jmpi.2020.7.2.52>
- Erawati, I., Darwis, M., Nasrullah, M., 2017. Efektivitas Kinerja Pegawai pada Kantor Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. *JO* 3, 13. <https://doi.org/10.26858/jo.v3i1.3450>
- Fachrunnisa, O., 2017. *Jurnal Ilmu Manajemen* Volume 4 Nomor 2 – Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya 5.
- F.L, I. lubis, M, M., n.d. Efektivitas Peraturan Badan Pengawas Makanan Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (Studi Kasus Kota Pekanbaru. UIN SUSKA.
- Hermanu, B., Handayani, D.I.W., 2019. OPTIMALISASI PERLINDUNGAN KONSUMEN PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA MELALUI PENGUATAN SISTEM KEAMANAN PANGAN TERPADU. *Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 17. <https://doi.org/10.36356/hdm.v17i1.1273>
- Irfandi, I., Heriwibowo, D., Rizqi, R.M., 2023. Pengaruh Jejaring Tata Kelola Pemerintahan dalam Meningkatkan Efektifitas Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Sumbawa Barat. *jiip* 6, 976–984. <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i2.1629>

- Karuniati, N.M.W., Sugianingrat, I.A.P.W., 2021. Pengaruh Citra Koperasi dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Nasabah Koperasi Amertha Dana Lestari di Badung. JWA 1, 394–411. <https://doi.org/10.32795/widyaamrita.v1i1.1188>
- Lihardi, M.I., 2021. Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Teratak Jering Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi 5.
- Masruri, M., Muazansyah, I., 2017. Analisis efektifitas program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perkotaan (PNPM-MP). JGPP 4. <https://doi.org/10.18196/jgpp.4281>
- Mukti, fajar, 2016. UMKM di Indonesia: Perspektif Hukum Ekonomi. 2016 112–142.
- Mulyadi, H., 2014. HUBUNGAN KEPEMIMPINAN DENGAN KINERJA PEGAWAI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PASAMAN 2.
- Munizu, M., n.d. Pengaruh Faktor-Faktor Eksternal dan Internal Terhadap Kinerja Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Sulawesi Selatan.
- Murdyastutik, A., Prasetya, H.A., Supranoto, S., 2022. Efektivitas Program pada Pelayanan Publik E-Parking di Taman Bungkul Kota Surabaya. E-SOS 9, 230. <https://doi.org/10.19184/e-sos.v9i3.36128>
- Pamungkas, S., n.d. ANALISIS SWOT SEBAGAI DASAR PERUMUSAN DAN IMPLEMENTASI STRATEGI PADA RESTORAN MIE COBEK MALANG.
- Pratiwi, D., Nataliawati, R., Dewi, A., Haskim, M.B., n.d. ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN LAMONGAN.
- Puteri, T.Y., Karyono, O., Agustina, K., 2022. ANALISIS HUBUNGAN FAKTOR-FAKTOR KUALITAS PELAYANAN DENGAN KINERJA PELAYANAN. JDMA 3, 41–48. <https://doi.org/10.31949/dialogika.v3i1.2115>
- Rahayu, F.P., Paselle, E., Khaerani, T.R., n.d. PELAKSANAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA SAMARINDA 9.
- Rahmadi, 2011. PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN. 2011 132, 59.

- Ruwaina, I., 2019. EFEKTIVITAS KEBIJAKAN ONLINE SINGLE SUBMISSION DALAM PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jawa Tengah. 2019 85.
- Santiago, B., Hidayatulloh, A., 2019. Analisis Faktor Eksternal Terhadap Faktor Internal dan Dampaknya Terhadap Kinerja UKM Daerah Istimewa Yogyakarta. *Manajemen* 8, 123–134. <https://doi.org/10.33059/jmk.v8i2.1638>
- Setyaningtyas, A.A., Jundillah, M.L., Kamila, V.Z., 2023. Penggunaan Metode Delone dan Mclean Untuk Menganalisis Kesuksesan Mulawarman Online Learning System (MOLS). *ATASI* 2, 110–118. <https://doi.org/10.30872/atasi.v2i2.1057>
- Sharon, G., 2021. TEORI WEWENANG DALAM PERIZINAN. *JUSTICIABELEN* 3, 50. <https://doi.org/10.30587/justiciabelen.v3i1.2249>
- Simamora, A., 2021. Efektivitas Sistem Online Single Submission (OSS) dalam Pengurusan Perizinan Berusaha di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang. 2021 145, 91.
- Susanthi, P.R., 2017. ANALISIS LINGKUNGAN INTERNAL DAN EKSTERNAL DALAM MENCAPAI TUJUAN PERUSAHAAN (STUDI KASUS STIE GALILEO BATAM) 1.
- Widyastuti, N., Rahardja, E., n.d. ANALISIS PENGARUH STRES KERJA, KOMPENSASI, DAN EMPLOYEE ENGAGEMENT TERHADAP KINERJA PEGAWAI.
- Yanggo, H.T., 2013. MAKANAN DAN MINUMAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. e-Journal Institut Agama Islam Negeri Ambon.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1: Transkrip Wawancara Staf DINAS KUMKM

Keterangan

P : Pewawancara

N : Narasumber

Wawancara bersama Staf Teknologi dan Informasi di PLUT KUMKM Jawa Tengah

Ibu Rahayu Bdi Arthani, S.pd.

P	:	Apakah sebagian besar pelaku usaha sudah memahami fungsi dan mekanisme izin berusaha?
N	:	Secara garis besar 75% dari para pelaku usaha yang terdaftar di PLUT KUMKM Jawa Tengah belum memahami mekanisme dari legalitas itu sendiri.
P	:	Bagaimana proses pendampingan yang dilakukan kepada pelaku UMKM terkait dengan legalitas usaha?
N	:	Dalam proses pendampingan pada pelaku UMKM yang akan membuat legalitas usaha, dilakukan mulai dari pelaku usaha tersebut belum apa-apa atau masih 0 sampai nantinya pelaku usaha tersebut memiliki legalitas usaha. Dimulai dari identifikasi usaha, apa yang dibutuhkan di usaha tersebut. Dimulai dari ijin usaha kemudian jika ijin usaha sudah maka melanjutkan ke legalitas selanjutnya dilihat dari jenis usahanya. Jika makanan dan minuman berarti PIRT. Dan pelaku usaha yang terdaftar di PLUT dalam legalitas usaha tidak semua pelaku usaha itu berproses dari 0, ada yang sudah memiliki salah satu legalitas usaha kemudian tinggal melanjutkan jenis legalitas usaha lain yang memang dibutuhkan
P	:	Apa tugas sebenarnya dari PLUT KUMKM?
N	:	Kami ditugaskan dari dinas UMKM untuk mensosialisasikan dan memberikan pemahaman digitalisasi penerbitan SPPIRT ini dengan menggunakan OSS, yang paling penting kami pelajari bersama dengan semua staf bagaimana cara OSS ini berjalan

Wawancara bersama Staf Jaringan Kerjasama di PLUT KUMKM Jawa Tengah
Bapak Agus Rahmat Widodo, S.E.

P	:	Apakah sebagian besar pelaku usaha sudah memahami fungsi dan mekanisme izin berusaha?
N	:	Sebagian sudah memahami setelah saya bombing perorangan, namun masih sangat banyak sekali pelaku usaha di luar yang masih sangat awam dengan perizinan.
P	:	Bagaimana cara membuat perizinan SPPIRT secara OSS?
N	:	Pertama siapkan berkas terlebih dahulu, seperti ktp, foto produk, label produk, jenis produk. Setelah itu nanti pelaku usaha bisa mengakses sendiri, rata rata masih sangat perlu kita dampingi secara langsung cara menggunakan OSS ini.
P	:	Bagaimana cara PLUT KUMKM memberitahukan bahwa sistem OSS ini sangat baik dan efisien ?
N	:	Kami ada program tersendiri untuk mensosialisasikan dan mendampingi para pelaku usaha untuk bisa menggunakan OSS sebagai aplikasi yang mempermudah proses pembuatan perizinan berusaha. Setiap hari kami siap melayani mereka, karna itu tugas kami sebagai konsultan. Bahkan Sabtu Minggu masih ada program untuk pelaku usaha. Semua kami berusaha memfasilitasi.

Wawancara bersama Staf Pembiayaan di PLUT KUMKM Jawa Tengah
Bapak Agus Mustofa, S.E, M.M.

P	:	Apakah sebagian besar pelaku usaha sudah memahami fungsi dan mekanisme izin berusaha?
N	:	Masih belum banyak, namun meningkat sedikit demi sedikit. Karna kami melakukan pelayanan langsung sebagaimana tugas kami.
P	:	Apa pendapat bapak terkait dengan sistem OSS ini?
N	:	Bermanfaat bagi kami staf dan pelaku usaha.
P	:	Bagaimana cara PLUT KUMKM memberitahukan bahwa sistem OSS ini sangat baik dan efisien ?
N	:	Jadi, karena sistem ini juga disediakan oleh pusat, para karyawan menerima arahan dari pusat terlebih dahulu. Kami kemudian memanfaatkan program kami untuk memperkenalkan OSS sebagai tanggapan atas arahan tersebut. Karena ketidaktahuan pelaku usaha, sosialisasi ini belum sepenuhnya berhasil. Akibatnya, jumlah pelaku usaha yang berkunjung ke PLUT menjadi lebih sedikit

Wawancara bersama Staf SDM di PLUT KUMKM Jawa Tengah
Ibu Yanuar Diah Laveti, S.Pd.,M.Si.

P	:	Apakah sebagian besar pelaku usaha sudah memahami fungsi dan mekanisme izin berusaha?
N	:	Sudah memahami sebenarnya
P	:	Apa pendapat anda dengan sistem OSS ini?
N	:	Bermanfaat
P	:	Bagaimana cara PLUT KUMKM memberitahukan bahwa sistem OSS ini sangat baik dan efisien?
N	:	Dengan adanya sosialisasi dari kami. Jujur mas, saya sendiri sebenarnya masih kesulitan untuk mensosialisasikan ke setiap daerah kecamatan di Kabupaten Banyumas ini. Jadi untuk sementara waktu kita lebih sering mengadakan di PLUT sendiri

Wawancara bersama Staf Kelembagaan di PLUT KUMKM Jawa Tengah
Ibu Rina Yulianti, S.H.

P	:	Apakah sebagian besar pelaku usaha sudah memahami fungsi dan mekanisme izin berusaha?
N	:	Sudah
P	:	Apa pendapat anda dengan sistem OSS ini?
N	:	Memudahkan kami dalam membantu menerbitkan SPP-IRT
P	:	Bagaimana langkah PLUT KUMKM untuk OSS kedepannya pada pelaku Usaha?
N	:	Kami memang bertugas untuk menjadi konsultan UMKM, baik dari segi perizinan, marketing, maupun pembiayaan. Jadi kami pasti siap membantu pelaku UMKM supaya bisa tercapai tujuannya terutama di bagian perizinan penerbitan SPPIRT. Seharusnya sistem OSS ini bisa sangat membantu, nanti kami lihat perkembangan UMKM di Banyumas

Lampiran 2 : Transkrip Wawancara dengan Pelaku UMKM

No.	Pertanyaan
1	Apakah SPP-IRT itu penting?
2	Apakah anda mengetahui adanya sistem OSS?
3	Bisakah anda menggunakan OSS untuk penerbitan SPP-IRT?
4	Bagaimana pendapat anda dengan adanya penerbitan SPP-IRT yang wajib menggunakan sistem OSS?
5	Mengapa anda berpendapat seperti demikian?

Pelaku UMKM	Usaha	Jawaban
Anggit Trianto	SAVANA GULA	<ol style="list-style-type: none"> 1. SPPIRT sangat penting bagi saya mas 2. Iya saya mengetahui sistem OSS 3. Insyallah juga sudah bisa sistem OSS 4. Kalau saya sendiri Alhamdulillah sangat terbantu dengan sistem ini mas. 5. Karena minggu lalu saya ikuti sosialisasi dari PLUT dan ternyata sangat membantu sekali. Saya bisa sekaligus 3 produk dalam satu minggu mengurus SPPIRT di rumah dengan OSS ini di web
Wahyu Nugroho	WAH Snack	<ol style="list-style-type: none"> 1. SPPIRT Penting mas 2. OSS Iya mengetahui 3. Sudah bisa sistemnya mas 4. Saya juga sama mas anggit, karna saya kan masih tetangga sama anggit. 5. Jadi lebih mudah setelah mengikuti sosialisasi bersama di PLUT, alhasil saya bareng sama anggit dan bayu menyelesaikan semua kepengurusan di rumah, sudah sangat jelas juga sosialisasi minggu lalu tentang web OSS
Bayu Setiawan	Rames dua Sodara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penting sekali 2. Mengetahui 3. Sudah faham mas 4. Bagi saya OSS ini sudah sangat meringankan saya untuk membuat perizinan 5. Karna saya sendiri tidak perlu lagi kesana kemari ke dinas terkait lagi. Ucap banyak

		terimakasih aja si sama staf PLUT karna sudah mau membantu kami memahami sistem OSS ini
Rosiatun Nisa	Keripik khas Banyumas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penting mas SPPIRT untuk produk saya 2. Tau saya mas ada sistem OSS sepeti itu dari sosialisasi minggu lalu 3. Tidak bisa mas tidak tau caranya 4. Tidak faham sama sekali saya mas, cara menggunakan web nya 5. Soalnya saya sendiri tidak begitu sering menggunakan hp mas
Desti Triarti	Desti Snak	<ol style="list-style-type: none"> 1. SPPIRT sangat penting 2. Saya mengetahui OSS 3. Bisa tapi masih merasa malas dengan menggunakan sistem OSS 4. Sistem OSS ini memang sangat membantu pelaku usaha, namun saya kurang mahir digital digital 5. Untuk orang yang sudah umur segini tidak begitu semangat menggunakan internet mas. Kalau saya sendiri masih mending datang langsung ke kantor dinas UMKM
Riny Nur Aeni	Seblak Bu Rini	<ol style="list-style-type: none"> 1. Iya penting 2. Mengetahui dari sosialisasi 3. Belum bisa menggunakan OSS 4. Bagus OSS ini namun ribet untuk ukuran saya mas 5. Saya masih bingung dan ngga bisa ngikutin alur sosialisasinya mas. Sistem ini paling nanti biar anak saya yang bantu ngurusin pakai OSS
Dewi Ariyani	Zizi snak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penting mas 2. Mengetahui 3. Belum bisa 4. Sangat awam mas bingung 5. Karna dengan usia saya masih mengandalkan registrasi atau pembuatan SPPIRT secara manual
Andri pambudi	Risky Berkah Mie & Pangsit	<ol style="list-style-type: none"> 1. PIRT penting bagi saya 2. Alhamdulillah sudah tau 3. Sudah bisa 4. OSS benar benar sangat bermanfaat 5. Saya ini kan rumahnya jauh dari kota mas, jadi sangat terbantu dengan sistem OSS ini setelah mengikuti progam dari PLUT
Dikin	Barokah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penting

	Chicken	<ol style="list-style-type: none"> 2. Tau mas 3. Tidak tahu mas 4. Kurang bisa memahami OSS 5. Karna HP saya tidak support mas untuk menggunakan web seperti itu, dan saya juga terlalu malas kalo dengan yang berhubungan pendaftaran di internet
Muhammad Ajb	Batagor Kuah Grendeng	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sangat penting itu SPPIRT 2. Tau banget mas 3. Insyallah bisa menggunakan OSS 4. Dengan adanya sosialisasi OSS progam dari PLUT saya sendiri merasa sangat terbantu untuk proses penerbitan SPPIRT ini 5. Karna praktis tidak memerlukan banyak biaya
Putri Rahayu	Bundane Snak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penting sekali mas 2. Iya saya tau OSS 3. Mengetahui sedikit Setelah mengikuti sosialisasi dari PLUT 4. Menurut saya sistem penerbitan dengan menggunakan OSS ini sangat membantu kalangan pelau usaha yang masih muda, karena anak muda pasti jauh lebih cepat memahami sistem OSS ini 5. Karena kalau untuk saya pribadi mas, saya masih kurang update dengan web web registrasi seperti ini. Jadi masih mending minta bantuan ke PLUT aja manual
Soemarno	Sambel Udang Cobek	<ol style="list-style-type: none"> 1. Iya penting 2. Tau mas 3. Belum bisa pakai OSS mas 4. Sebenarnya bagus OSS, praktis dan efisien 5. Saya masih belum mengerti mas, karna mudah lupa kalo menggunakan sistem internet seperti ini
Sulistyanto	Griya Madu Toyamili	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sangat penting sekali PIRT mas 2. Iya saya tau mas tentang OSS 3. Bisa kalo saya pelajari lagi 4. Sistem OSS ini sebenarnya sangat membantu mas 5. Namun dengan kesibukan saya masih kesulitan menahan kesabaran untuk mengakses web OSS ini. Jadi ya sudahlah

		<p>biar anak saya saja yang mengurusnya ke PLUT</p>
<p>Aprilistiani</p>	<p>Bebek Ungkep Real</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sangat penting 2. Tau mas 3. Belum bisa 4. Bagus sebenarnya OSS ini mas 5. Tidak semudah itu mas bagi saya untuk mengurus penerbitan SPPIRT menggunakan sistem OSS ini, saya ibu rumah tangga sekaligus usaha sendiri. Masih bingung dengan alur penerbitan SPPIRT di OSS ini
<p>Eni Purnamawati</p>	<p>Kering Kentang Bariklana</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. SPP-IRT penting 2. Tau saya sistem OSS 3. Saya sendiri ngga bisa menggunakan sistem OSS 4. Wah sangat terbantu sekali mas dengan adanya sistem OSS ini, dengan sekali registrasi sudah bisa mengurus penerbitan SPPIRT untuk 3 produk saya. Tapi saya sendiri si kurang tau menau dengan sistem ini, 5. Karena saya ngga paham alurnya padahal sudah ikut sosialisasi, sistem ini mudah di mengerti namun sama anak saya. Jadi anak saya yang membantu saya menggunakan sistem OSS ini

Lampiran 3 : Dokumentasi



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Habib Risnanto
2. NIM : 1717201191
3. Tempat/Tgl Lahir : Banyumas/ 12 Maret 1998
4. Jenis Kelamin : Laki - Laki
5. Agama : Islam
6. Alamat Rumah : Bancarkembar, Rt 01 Rw 07, Kelurahan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas
7. Email : habib.risnan121998@gmail.com
8. Nama Orang Tua
Ayah : Nursaeran
Ibu : Sunarti
9. Nama Isteri : Febia Citraeni Rusdaita, S.Farm

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. TK Aisyah 8 Bancarkembar
 - b. SD N 3 Bancarkembar, 2012
 - c. SMP N 6 Purwokerto, 2014
 - d. SMK WIWOROTOMO PWT, 2016
 - e. S.1, Tahun Masuk : 2017
2. Pendidikan Non Formal
 - a. Pesantren Darul Hikmah Subulissallam Pasir Kidul
 - b. Pesantren Assidah Ulul Albab Karang Salam Kidul
 - c. PAC IPNU Purwokerto Utara
 - d. UKM PIQSI UIN SAIZU Purwokerto
 - e. UKM MASTER UIN SAIZU Purwokerto
 - f. OPA ARCASENA Purwokerto